



2020

UNAUDITED

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



POSISI 31 DESEMBER 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Eselon I dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 22 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.711.055.508.075,- atau mencapai 107 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 3.452.310.586.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp 9.513.422.842.201,- atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.911.938.562.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 .

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 59.753.479.086.458,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 247.298.956.711,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 58.433.810.778.675,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp 9.102.308.188,-; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 1.063.267.042.884,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 3.798.138.202,- dan Rp 59.749.680.948.256,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.690.427.020.603,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 8.239.337.229.032,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (4.548.910.208.429,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit Rp (60.067.183.888,-) dan Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (4.608.977.392.317,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp 2.786.041.263.188,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp(4.608.977.392.317),- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 1.085.901.805.786 dan transaksi antar entitas senilai Rp 6.320.261.052.707,- sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 59.749.680.948.256,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2020		% THD ANGG	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	3.452.310.586.000	3.711.055.508.075	107,49	3.928.867.125.168
JUMLAH PENDAPATAN		3.452.310.586.000	3.711.055.508.075	107,49	3.928.867.125.168
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
BELANJA PEGAWAI	B.3	1.760.953.117.000	1.717.590.901.468	97,54	1.849.544.240.785
BELANJA BARANG	B.4	3.565.651.196.000	3.483.287.946.778	97,69	3.522.310.313.752
BELANJA MODAL	B.5	4.585.334.249.000	4.312.543.993.955	94,05	4.304.664.084.459
JUMLAH BELANJA		9.911.938.562.000	9.513.422.842.201	95,98	9.676.518.638.996

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	C.1	65.204.207	243.211.026
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	C.2	222.794.110	596.496.119
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	C.3	1.569.164.904	881.767.576
BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)	C.7	32.084.250	0
PIUTANG BUKAN PAJAK	C.4	46.803.287.138	42.561.344.126
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK	C.6	(19.049.325.829)	(17.562.925.009)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		27.753.961.309	24.998.419.117
PERSEDIAAN	C.8	217.655.747.931	515.267.986.930
JUMLAH ASET LANCAR		247.298.956.711	541.987.880.768
ASET TETAP			
TANAH	C.13	11.780.818.390.655	11.038.681.998.460
PERALATAN DAN MESIN	C.14	17.061.491.481.142	16.878.479.162.888
GEDUNG DAN BANGUNAN	C.15	7.091.879.825.039	6.304.702.199.357
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	C.16	23.203.656.313.171	22.381.707.391.665
ASET TETAP LAINNYA	C.17	44.686.110.058	43.226.472.933
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	C.18	13.525.736.144.844	10.627.916.314.306
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.19	(14.274.457.486.234)	(11.871.070.815.180)
JUMLAH ASET TETAP		58.433.810.778.675	55.403.642.724.429
PIUTANG JANGKA PANJANG			
PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	C.9	9.478.598.990	9.518.509.139
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	C.10	(376.290.802)	(376.490.353)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		9.102.308.188	9.142.018.786
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		9.102.308.188	9.142.018.786
ASET LAINNYA			
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	C.20	401.218.575.000	398.486.218.000
ASET TAK BERWUJUD	C.21	512.170.217.993	454.695.973.270
ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	C.22	13.566.289.300	19.282.994.250
ASET LAIN-LAIN	C.23	490.258.835.971	481.045.004.904
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.24	(353.946.875.380)	(350.250.907.356)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.063.267.042.884	1.003.259.283.068
JUMLAH ASET		59.753.479.086.458	56.958.031.907.051

KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	C.26	3.086.240.444	5.293.213.945
HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	C.28	646.693.551	0
UANG MUKA DARI KPPN	C.25	65.204.207	243.211.026
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.798.138.202	5.536.424.971
JUMLAH KEWAJIBAN		3.798.138.202	5.536.424.971
EKUITAS			
EKUITAS			
EKUITAS	C.30	59.749.680.948.256	56.952.495.482.080
JUMLAH EKUITAS		59.749.680.948.256	56.952.495.482.080
JUMLAH EKUITAS		59.749.680.948.256	56.952.495.482.080
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		59.753.479.086.458	56.958.031.907.051

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0
Pendapatan Cukai		0	0
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0
Pendapatan Bea Masuk		0	0
Pendapatan Bea Keluar		0	0
		0	0
JUMLAH PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.690.427.020.603	3.821.720.026.664
		3.690.427.020.603	3.821.720.026.664
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		0	0
		0	0
JUMLAH PENDAPATAN HIBAH			
		3.690.427.020.603	3.821.720.026.664
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.715.775.702.835	1.806.404.722.928
Beban Persediaan	D.3	344.156.053.787	443.156.252.826
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.338.327.025.660	1.955.177.795.545
Beban Pemeliharaan	D.5	561.539.042.736	623.008.553.324
Beban Perjalanan Dinas	D.6	258.877.554.781	516.146.948.438
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	308.712.496.561	210.751.240
Beban Bunga		0	0
Beban Subsidi		0	0
Beban Hibah		0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.710.451.954.462	2.806.400.218.839
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.497.398.210	(13.179.645.956)
Beban Lain-Lain		0	0
		8.239.337.229.032	8.137.325.597.184
JUMLAH BEBAN			
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.548.910.208.429)	(4.315.605.570.520)

KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(94.271.627.684)	(1.413.477.781.828)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	3.943.194.271	2.844.428.143
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	98.214.821.955	1.416.322.209.971
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		34.204.443.796	902.540.401.638
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	51.825.249.005	927.168.308.028
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	17.620.805.209	24.627.906.390
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(60.067.183.888)	(510.937.380.190)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.608.977.392.317)	(4.826.542.950.710)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.16	0	0
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.608.977.392.317)	(4.826.542.950.710)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TINGKAT ESELON I SELAKU UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I (UAPPA/B-E1) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	56.952.495.482.080	54.166.454.218.892
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4.608.977.392.317)	(4.826.542.950.710)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		1.085.901.805.786	1.901.046.261.554
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3.1	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	11.695.532.778	4.358.493.776
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		20.297.655.112	18.987.830.914
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	1.190.880.978.476	625.635.619.456
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(140.918.399.187)	1.267.453.361.408
LAIN-LAIN	E.3.6	3.946.038.607	(15.389.044.000)
JUMLAH		1.085.901.805.786	1.901.046.261.554
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.320.261.052.707	5.711.537.952.344
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.797.185.466.176	2.786.041.263.188
EKUITAS AKHIR	E.5	59.749.680.948.256	56.952.495.482.080

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis dan administrasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui Peran tersebut diharapkan kualitas Laporan Kementerian/Lembaga dapat ditingkatkan pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen dengan visi "Terwujudnya penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem Akuntansi Pemerintah menuju Laporan Keuangan yang berkualitas" untuk memujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap terhadap Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah;
- Mengembangkan sistem pendukung yang profesional dan terpercaya;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perhubungan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 303 Satker. Rincian Satker tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	0100	DKI Jakarta	1		15						16
2	0199	Kantor Pusat			0						0
3	0200	Jawa Barat			5						5
4	0300	Jawa Tengah			10						10
5	0500	Jawa Timur			16						16
6	0600	Aceh			11						11
7	0700	Sumatera Utara			19						19
8	0800	Sumatera Barat			5						5

9	0900	Riau			14						14		
10	1000	Jambi			5						5		
11	1100	Sumatera Selatan			3						3		
12	1200	Lampung			6						6		
13	1300	Kalimatan Barat			8						8		
14	1400	Kalimatan Tengah			7						7		
15	1500	Kalimatan Selatan			5						5		
16	1600	Kalimatan Timur			10						10		
17	1700	Sulawesi Utara			11						11		
18	1800	Sulawesi Tengah			12						12		
19	1900	Sulawesi Selatan			16						16		
20	2000	Sulawesi Tenggara			9						9		
21	2100	Maluku			16						16		
22	2200	Bali			6						6		
23	2300	NTB			8						8		
24	2400	NTT			16						16		
25	2500	Papua			13						13		
26	2600	Bengkulu			3						3		
27	2800	Maluku Utara			10						10		
28	2900	Banten			3						3		
29	3000	Bangka Belitung			5						5		
30	3100	Gorontalo			4						4		
31	3200	Kepulauan Riau			10						10		
32	3300	Irian Jaya Barat			11						11		
33	3400	Sulawesi Barat			4						4		
34	3500	Kalimantan Utara			6						6		
JUMLAH					1	0	302	0	0	0	0	0	303

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa PNBPN diakui setelah selesai dilakukannya pelayanan jasa terhadap pengguna jasa.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap **(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali **(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Table 1

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan Bmn Iuran Badan Usaha	14.014.787.000	14.014.787.000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi Dan Informatika	3.438.295.799.000	3.438.295.799.000
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Dan	0	0
Pendapatan Denda	0	0
Pendapatan Lain Lain	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	3.452.310.586.000	3.452.310.586.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	1.886.688.194.000	1.760.953.117.000
Belanja Barang	3.962.652.054.000	3.565.651.196.000
Belanja Modal	5.096.814.583.000	4.585.334.249.000
JUMLAH BELANJA	10.946.154.831.000	9.911.938.562.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Table 2

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	4.260.331.164.000	3.698.288.046.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut	469.724.284.000	301.151.431.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	286.810.522.000	86.675.892.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	1.702.151.446.000	1.737.843.841.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	4.149.371.591.000	4.022.298.693.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	53.162.035.000	41.076.870.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan	24.603.789.000	24.603.789.000
JUMLAH PENDAPATAN	10.946.154.831.000	9.911.938.562.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.711.055.508.075,- atau mencapai 107,49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 3.452.310.586.000,-. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Table 3

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan Bmn luran Badan Usaha	14.014.787.000	28.837.681.586	205,77
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi Dan Informatika	3.438.295.799.000	3.656.962.755.404	106,36
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Dan	0	884.784.820	0,00
Pendapatan Denda	0	2.527.728.989	0,00
Pendapatan Lain Lain	0	21.842.557.276	0,00
JUMLAH	3.452.310.586.000	3.711.055.508.075	107,49

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 5,54% persen dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh kondisi Pandemi virus Covid-19 terhitung mulai bulan Maret 2020 yang berdampak secara langsung terhadap keadaan ekonomi global yang mengakibatkan tekanan terhadap bisnis maupun kuantitas perdagangan baik itu ekspor maupun impor barang. Penurunan perdagangan berupa impor/ekspor barang sangat erat kaitannya dengan penurunan jumlah pergerakan kapal di pelabuhan, dimana dengan berkurangnya pergerakan kapal maka akan mempengaruhi pendapatan PNPB yang bersumber dari pendapatan jasa transportasi laut (PUJK, PUP, Kenavigasian) yang dapat dilihat dalam tabel 4 menunjukkan penurunan sebesar 5,54% atau senilai Rp. 217.811.617.093

Table 4

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan Bmn luran Badan Usaha	28.837.681.586	10.255.091.978	181,20
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi Dan Informatika	3.656.962.755.404	3.803.391.820.188	(3,85)

Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan Dan	884.784.820	581.316.330	52,20
Pendapatan Denda	2.527.728.989	9.886.258.200	(74,43)
Pendapatan Lain Lain	21.842.557.276	104.752.638.472	(79,15)
JUMLAH	3.711.055.508.075	3.928.867.125.168	(5,54)

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Rp
9.513.508.103.952,-

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp 9.513.508.103.952,- atau 95,98% dari anggaran belanja sebesar Rp 9.911.938.562.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Table 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

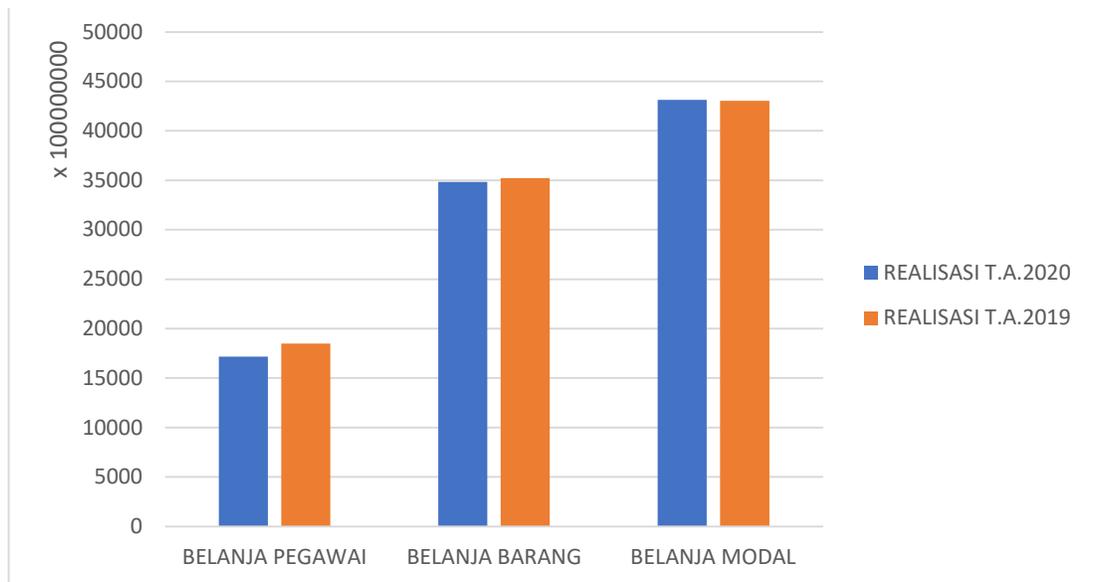
URAIAN	2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	1.760.953.117.000	1.717.804.159.783	97,55
Belanja Barang	3.565.651.196.000	3.488.167.509.000	97,83
Belanja Modal	4.585.334.249.000	4.312.608.856.347	94,05
Total Belanja Kotor	9.911.938.562.000	9.518.580.525.130	96,03
Pengembalian Belanja	0	(5.072.421.178)	0,00
TOTAL BELANJA	9.911.938.562.000	9.513.508.103.952	95,98

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Table 6

URAIAN	2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	3.698.288.046.000	3.599.755.194.363	97,34
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut	301.151.431.000	297.567.653.885	98,81
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	86.675.892.000	84.016.130.385	96,93
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	1.737.843.841.000	1.711.577.226.783	98,49
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	4.022.298.693.000	3.755.862.069.329	93,38
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	41.076.870.000	40.948.269.938	99,69
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan	24.603.789.000	23.781.559.269	96,66
TOTAL BELANJA	9.911.938.562.000	9.513.508.103.952	95,98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 1,68% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja antara posisi 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 163.010.535.044. Jika dirinci maka dapat disampaikan bahwa untuk realisasi belanja modal per 31 Desember 2020 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2019, sedangkan untuk realisasi belanja pegawai dan belanja modal 31 Desember 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 131.868.077.566 atau sekitar 7,13% serta belanja barang mengalami penurunan sebesar 39.022.366.874

Table 7

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
BELANJA PEGAWAI	1.717.676.163.219	1.849.544.240.785	(7,13)
BELANJA BARANG	3.483.287.946.778	3.522.310.313.752	(1,11)
BELANJA MODAL	4.312.543.993.955	4.304.664.084.459	0,18
JUMLAH	9.513.508.103.952	9.676.518.638.996	(1,68)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp 1.717.676.163.219,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.717.676.163.219,- dan Rp 1.849.544.240.785,-. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 7,13 persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan jumlah penerimaan PNS baru jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang pensiun yang tidak seimbang, bahwa jumlah PNS yang pensiun lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pegawai baru. Penurunan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS adalah sebesar 7.245.872.276 atau 0,79%

2. Penurunan realisasi Belanja Khusus Belanja Pegawai Transito yaitu berupa pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Penyebab turunnya realisasi karena adanya karena jumlah PNS yang pensiun lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pegawai baru serta kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait gaji ke-13 dan gaji THR yang dibayarkan tanpa komponen tunjangan kinerja sehingga jika diakumulasikan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.140.005.726.114 atau 16,04%.

Table 8

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Dan Tunjangan PNS	910.845.224.588	918.091.096.864	(0,79)
Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Non PNS	118.775.300	127.446.200	(6,80)
Belanja Lembur	74.117.172.079	59.122.705.411	25,36
Belanja Tunj Khusus Belanja Pegawai Transito	732.722.987.816	872.728.713.930	(16,04)
Jumlah Belanja Kotor	1.717.804.159.783	1.850.069.962.405	(7,15)
Pengembalian Belanja Pegawai	(127.996.564)	(525.721.620)	(75,65)
JUMLAH BELANJA	1.717.676.163.219	1.849.544.240.785	(7,13)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp
3.483.287.946.778,-

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.483.287.946.778,- dan Rp 3.522.310.313.752,-. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan senilai 39.022.366.974 atau sebesar 1,11% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- 1 Realisasi Belanja Barang Operasional mengalami penurunan tipis senilai 6.970.820.990 atau senilai 1.61% jika dibandingkan realisasi belanja barang operasional Tahun 2019
- 2 Realisasi Belanja Jasa mengalami penurunan senilai 32.488.792.561 atau sebesar 12.47% jika dibandingkan dengan Tahun 2019, hal tersebut dikarenakan adanya *refocusing* khususnya kegiatan belanja jasa lainnya yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19
- 3 Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan senilai 181.303.846.031 atau sebesar 19.69% jika dibandingkan dengan Tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan belanja pemeliharaan bagi aset yang dinilai masih cukup baik kondisinya untuk kemudian dana tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19
- 4 Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan senilai 240.722.102.479 atau sebesar 48.37% jika dibandingkan dengan Tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait penghematan dan pemotongan anggaran perjalanan dinas atas dampak dari Pandemi Covid-19
- 5 Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan senilai 18.278.042.490 atau sebesar 88.41% jika dibandingkan dengan Tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait penghematan dan pemotongan anggaran perjalanan dinas atas dampak dari Pandemi Covid-19

- 6 Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat mengalami penurunan senilai 35.649.843.067 atau sebesar 66.84% jika dibandingkan dengan Tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat hanya berupa biaya mobilisasi kapal yang sudah selesai dibangun dan tidak ada lagi penambahan pembangunan kapal

Table 9

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	426.681.822.233	433.652.643.223	(1,61)
Belanja Barang Non Operasional	1.686.396.206.851	1.260.571.634.698	33,78
Belanja Barang Persediaan	130.194.010.663	77.454.253.897	68,09
Belanja Jasa	228.028.535.347	260.517.327.908	(12,47)
Belanja Pemeliharaan	739.586.997.998	920.890.844.029	(19,69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	256.967.582.405	497.689.684.884	(48,37)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.396.094.460	20.674.136.950	(88,41)
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	17.682.423.103	53.332.266.170	(66,84)
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	233.835.940	205.969.000	13,53
Jumlah Belanja Kotor	3.488.167.509.000	3.524.988.760.759	(1,04)
Pengembalian Belanja Barang	(4.879.562.222)	(2.678.447.007)	82,18
JUMLAH BELANJA	3.483.287.946.778	3.522.310.313.752	(1,11)

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal Rp
4.312.543.993.955,-*

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 4.312.543.993.955,- dan Rp 4.304.664.084.459,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019.

Jika dilihat dari tabel 10 dapat diketahui bahwa Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu senilai 523.288.170.521 atau sebesar 20,44%, kemudian diikuti kenaikan realisasi belanja modal tanah senilai 137.835.935.241 atau sebesar 20,44% dibandingkan realisasi belanja modal tahun sebelumnya.

Namun sebaliknya untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya masing-masing mengalami penurunan sebesar 162.746.846.376 (29,86%) dan 490.295.273.447 (45,03%)

Table 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	193.187.009.518	55.351.074.277	249,02
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	382.369.720.448	545.116.566.824	(29,86)

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	3.083.072.297.234	2.559.784.126.713	20,44
Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan	598.480.833.598	1.088.776.107.045	(45,03)
Belanja Modal Lainnya	55.498.995.549	55.901.670.324	(0,72)
Jumlah Belanja Kotor	4.312.608.856.347	4.304.929.545.183	0,18
Pengembalian Belanja Modal	(64.862.392)	(265.460.724)	(75,57)
JUMLAH BELANJA	4.312.543.993.955	4.304.664.084.459	0,18

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah
Rp 193.187.009.518,-

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 193.187.009.518,- dan Rp 55.342.194.277,-. Realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 249,08 persen dibandingkan TA 2019.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu pembangunan pelabuhan Patimban memperoleh dana pembebasan tanah yang semula dilakukan oleh LMAN namun pada pelaksanaannya di revisi menjadi kegiatan yang tercantum pada DIPA Kantor KSOP Patimban dengan nilai sebesar 174.860.349.434.

Table 11

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	17.815.415.564	54.720.259.598	(67,44)
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	7.740.000	48.900.000	(84,17)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	503.504.520	316.177.000	59,25
Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang	174.860.349.434	0	100,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	195.000.000	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	70.737.679	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	193.187.009.518	55.351.074.277	249,02
Pengembalian Belanja Modal	0	(8.880.000)	(100,00)
JUMLAH BELANJA	193.187.009.518	55.342.194.277	249,08

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp 382.369.600.448,-

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp 382.369.600.448,-, mengalami penurunan sebesar 29,85 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp 545.084.992.295,-.

Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 Ditjen Perhubungan Laut merupakan salah satu subsektor yang terkena penghematan dan pemotongan anggaran akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dimana salah satu belanja yang terkena pemotongan/penghematan adalah belanja peralatan dan mesin

Table 12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	369.857.467.524	540.025.759.011	(31,51)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	34.735.000	53.580.000	(35,17)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	910.923.200	207.339.000	339,34
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	4.800.000	0	100,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	301.363.346	1.424.905.313	(78,85)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	2.859.200.078	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	8.401.231.300	3.404.983.500	146,73
Jumlah Belanja Kotor	382.369.720.448	545.116.566.824	(29,86)
Pengembalian Belanja Modal	(120.000)	(31.574.529)	(99,62)
JUMLAH BELANJA	382.369.600.448	545.084.992.295	(29,85)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 3.235.311.317.185,-

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.235.311.317.185,- dan Rp 2.577.662.416.040,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 25,51 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kenaikan yang cukup signifikan Belanja Modal Gedung Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 mengalami kenaikan senilai 389.008.712.700 atau sebesar 15,30% jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Kenaikan ini dikarenakan alokasi Pinjaman Luar Negeri (*Loan*) dari JICA untuk Pekerjaan Proyek Strategis Nasional di Pelabuhan Patimban dengan nilai realisasi mencapai 2.702.441.056.550
- 2 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan 100% atau senilai 133.133.288.566 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan dukungan Ditjen Perhubungan Laut dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 mengingat sektor transportasi laut memiliki mobilitas dan perpindahan orang (penumpang) yang berjumlah cukup besar

Table 13

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.930.782.092.891	2.541.773.380.191	15,30
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	3.060.000	22.650.000	(86,49)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	1.739.673.960	0	100,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	320.903.528	522.647.600	(38,60)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	133.133.288.566	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	17.093.278.289	17.233.255.668	(0,81)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	0	232.193.254	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	3.083.072.297.234	2.559.784.126.713	20,44
Pengembalian Belanja Modal	(48.124.392)	(109.807.195)	(56,17)
JUMLAH BELANJA	3.235.311.317.185	2.577.662.416.040	25,51

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan Rp
598.464.215.598,-

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 598.464.215.598,- dan Rp 1.088.660.908.045,-. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar 45,03 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019.

Penurunan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2020 adalah yang paling signifikan yaitu senilai 487.816.969.981 atau sebesar 45,19%. Penurunan ini sebagai akibat dari beralihnya pos Pinjaman Luar Negeri Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban dimana pada Tahun 2020 untuk dana *Loan* di alokasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sedangkan pada Tahun 2019 dialokasikan pada Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan nilai anggaran yang cukup signifikan

Table 14

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	591.582.625.536	1.079.399.595.517	(45,19)
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	10.000.000	570.300.000	(98,25)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	10.110.000	30.040.000	(66,34)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	595.958.862	807.220.960	(26,17)
Belanja Modal Irigasi	5.803.867.500	1.123.050.200	416,80
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	8.861.000	0	100,00
Belanja Modal Jaringan	469.410.700	6.505.963.113	(92,78)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	339.937.255	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	598.480.833.598	1.088.776.107.045	(45,03)
Pengembalian Belanja Modal	(16.618.000)	(115.199.000)	(85,57)
JUMLAH BELANJA	598.464.215.598	1.088.660.908.045	(45,03)

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya
Rp 55.498.995.549,-

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 55.498.995.549,- dan Rp 55.901.670.324,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0,72 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019.

Perubahan berupa penurunan realisasi Belanja Modal Lainnya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu senilai 402.674.775 atau sebesar 0,72%.

Table 15

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember TA 2020 dan TA 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A.2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	55.498.995.549	55.901.670.324	(0,72)
Jumlah Belanja Kotor	55.498.995.549	55.901.670.324	(0,72)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA	55.498.995.549	55.901.670.324	(0,72)

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
65.204.207,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 65.204.207,- dan Rp 243.211.026,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

URAIAN	TH 2020	TH 2019
BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	0	103.417.000
BA(022) ES1(04) ACEH	27.870.607	0
BA(022) ES1(04) SUMATERA UTARA	0	100.000.000
BA(022) ES1(04) RIAU	19.333.600	0
BA(022) ES1(04) JAMBI	0	33.000.000
BA(022) ES1(04) MALUKU	0	1.073.526
BA(022) ES1(04) NTT	0	2.500
BA(022) ES1(04) GORONTALO	0	5.718.000
BA(022) ES1(04) IRIAN JAYA BARAT	18.000.000	0
JUMLAH	65.204.207	243.211.026

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp
222.794.110,-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp 222.794.110,- dan Rp 596.496.119,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

URAIAN	TH 2020	TH 2019
BA(022) ES1(04) KALIMATAN TENGAH	0	347.370.643
BA(022) ES1(04) MALUKU	162.469.014	146.336.684
BA(022) ES1(04) NTT	0	24.238.375
BA(022) ES1(04) MALUKU UTARA	60.325.096	76.496.962
BA(022) ES1(04) GORONTALO	0	2.053.455
JUMLAH	222.794.110	596.496.119

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp
1.569.164.904,-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 1.569.164.904,- dan Rp 881.767.576,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

JENIS	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	27.763.346	0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	894.708.007	881.767.576
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	646.693.551	0
JUMLAH	1.569.164.904	881.767.576

Piutang Bukan Pajak
Rp 46.803.287.138,-

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 46.803.287.138,- dan Rp 42.561.344.126,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

URAIAN	TH 2020	TH 2019
1. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		
BA(022) ES1(04) NAMA UAPPAW TIDAK DITEMUKAN	290.449.693	238.173.822
BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	5.449.289.174	5.448.525.979
BA(022) ES1(04) JAWA BARAT	471.110.105	196.070.954
BA(022) ES1(04) JAWA TENGAH	918.529.985	762.917.999
BA(022) ES1(04) JAWA TIMUR	4.135.371.620	2.485.872.760
BA(022) ES1(04) ACEH	4.281.505.040	1.375.156.839
BA(022) ES1(04) SUMATERA UTARA	647.393.540	739.031.751
BA(022) ES1(04) SUMATERA BARAT	375.062.439	242.592.725
BA(022) ES1(04) RIAU	1.770.480.723	1.490.802.841
BA(022) ES1(04) JAMBI	52.244.776	12.880.765
BA(022) ES1(04) SUMATERA SELATAN	1.482.877.416	1.366.440.249
BA(022) ES1(04) LAMPUNG	161.490.500	417.697.470
BA(022) ES1(04) KALIMATAN BARAT	139.990.911	130.726.907
BA(022) ES1(04) KALIMATAN TENGAH	69.888.550	47.846.619
BA(022) ES1(04) KALIMATAN SELATAN	1.055.971.838	1.570.358.781
BA(022) ES1(04) KALIMATAN TIMUR	6.437.850.828	4.668.135.774
BA(022) ES1(04) SULAWESI UTARA	158.381.706	102.699.057
BA(022) ES1(04) SULAWESI TENGAH	891.308.114	453.477.959
BA(022) ES1(04) SULAWESI SELATAN	353.653.841	401.472.199
BA(022) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	79.584.375	361.649.001
BA(022) ES1(04) MALUKU	147.826.091	235.820.959
BA(022) ES1(04) BALI	53.411.203	202.073.542
BA(022) ES1(04) NTB	99.849.374	130.481.273
BA(022) ES1(04) NTT	17.000.000	83.130.504
BA(022) ES1(04) PAPUA	140.062.524	86.194.875
BA(022) ES1(04) BENGKULU	72.057.300	81.144.910
BA(022) ES1(04) MALUKU UTARA	235.660.690	82.119.353
BA(022) ES1(04) BANTEN	1.195.365.658	1.035.866.119
BA(022) ES1(04) BANGKA BELITUNG	0	1.791.204
BA(022) ES1(04) GORONTALO	5.728.000	5.652.060
BA(022) ES1(04) KEPULAUAN RIAU	11.372.913.427	11.603.326.864

BA(022) ES1(04) IRIAN JAYA BARAT	81.241.570	82.664.840
BA(022) ES1(04) SULAWESI BARAT	113.926.560	216.303.252
BA(022) ES1(04) KALIMANTAN UTARA	241.904.885	41.640.277
Jumlah Piutang PNB	42.999.382.456	36.400.740.483
2. Piutang Lainnya		
BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	0	1.619.587.881
BA(022) ES1(04) JAWA BARAT	3.803.617.682	3.803.617.682
BA(022) ES1(04) SUMATERA UTARA	287.000	0
BA(022) ES1(04) BALI	0	737.398.080
Jumlah Piutang Lainnya	3.803.904.682	6.160.603.643
JUMLAH	46.803.287.138	42.561.344.126

Bagian Lancar TP/TGR
Rp 0,-

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2020	TH 2019
1. Bagian Lancar TP		
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>		
Jumlah Bagian Lancar TP	0	0
2. Bagian Lancar TGR		
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>		
Jumlah Bagian Lancar TGR	0	0
JUMLAH	0	0

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Pendek Rp
19.049.325.829,-

C.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 19.049.325.829,- dan Rp 17.562.925.009,-.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Pe nyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	27.851.993.033	0,0050	139.259.974
Kurang Lancar	38.400.000	0,10	3.840.000
Diragukan	13.336.500	0,50	6.668.250
Macet	18.899.557.605	1,00	18.899.557.605

Jumlah	46.803.287.138	-	19.049.325.829
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,00	0
Kurang Lancar	0	0,00	0
Diragukan	0	0,00	0
Macet	0	0,00	0
Jumlah	0	0,00	0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,00	0
Kurang Lancar	0	0,00	0
Diragukan	0	0,00	0
Macet	0	0,00	0
Jumlah	0	-	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	46.803.287.138	-	19.049.325.829

Belanja Dibayar di Muka Rp 32.084.250,-

C.7. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 32.084.250,- dan Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	32.084.250	0
JUMLAH	32.084.250	0

Terdapat Belanja Barang Dibayar Dimuka berupa pembayaran atas Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebesar Rp32.084.250,-. Satker tidak memiliki aset Rumah Dinas sehingga dibutuhkan penyewaan kepada pihak ketiga pada tanggal 17 November 2020 untuk penyewaan rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Kantor.

Persediaan Rp 217.655.747.931,-

C.8. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 217.655.747.931,- dan Rp 515.267.986.930,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TH 2020	TH 2019
1.	Barang Konsumsi	69.631.125.971	70.632.963.137
2.	Amunisi	70.101.810	70.101.810
3.	Bahan untuk Pemeliharaan	3.556.860.991	5.330.711.197
4.	Suku Cadang	30.003.347.712	40.008.676.726

5.	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	18.187.700
6.	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16.051.385.168	319.726.285.108
8.	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	17.682.423.103	737.910.000
9.	Bahan Baku	30.184.400.585	33.402.792.620
10.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.183.123.352	1.347.239.327
11.	Persediaan Lainnya	49.292.979.239	43.993.119.305
JUMLAH		217.655.747.931	515.267.986.930

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp
9.478.598.990,-

C.9. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 9.478.598.990,- dan Rp 9.518.509.139,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TH 2020	TH 2019
1.	BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	349.326.142	349.326.142
2.	BA(022) ES1(04) JAWA BARAT	1.000.000	0
3.	BA(022) ES1(04) ACEH	1.089.851	0
4.	BA(022) ES1(04) SUMATERA SELATAN	7.411.407.551	7.411.407.551
5.	BA(022) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1.381.216.137	1.423.216.137
6.	BA(022) ES1(04) MALUKU	112.500.000	112.500.000
7.	BA(022) ES1(04) PAPUA	180.754.100	180.754.100
8.	BA(022) ES1(04) IRIAN JAYA BARAT	41.305.209	41.305.209
JUMLAH		9.478.598.990	9.518.509.139

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Tagihan
TP/TGR Rp
376.290.802,-

C.10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 376.290.802,- dan Rp 376.490.353,-. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas	Nilai Piutang	% Pe nyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			

Lancar	8.794.713.539	0,0050	43.973.567
Kurang Lancar	390.631.351	0,10	39.063.135
Diragukan	0	0,50	0
Macet	293.254.100	1,00	293.254.100
Jumlah	9.478.598.990	-	376.290.802
Tagihan PA			
Lancar	0	0,00	0
Kurang Lancar	0	0,00	0
Diragukan	0	0,00	0
Macet	0	0,00	0
Jumlah	0	0,00	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR	9.478.598.990	-	376.290.802

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp 0,-

C.11. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah Piutang yang masa penagihannya melebihi batas waktu penagihan dan telah digolongkan berkualitas macet pada piutang tersebut. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TH 2020	TH 2019
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>			
JUMLAH		0	0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp 0,-

C.12. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

Kualitas	Nilai Piutang	% Pe	
		nyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	0	0,00	0
Kurang Lancar	0	0,00	0
Diragukan	0	0,00	0
Macet	0	0,00	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0,00	0

Tanah Rp
11.780.818.390.655,-

C.13. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 11.780.818.390.655,- dan Rp 11.038.681.998.460,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	11.038.681.998.460
Mutasi Tambah :		
- Koreksi Kesalahan input IP	Rp.	16.581.991.800
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp.	22.026.921.600
- Saldo Awal	Rp.	660.325.109.342
- Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	3.704.567.569
- Pembelian	Rp.	5.436.435.000
- Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp.	12.866.023.091
- Hibah (Masuk)	Rp.	27.601.540.656
- Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	27.957.000
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp.	379.871.000
- Reklasifikasi Masuk	Rp.	299.592.396.865
- Pengembangan Nilai Aset	Rp.	1.004.529.020
- Transfer Masuk	Rp.	679.823.000
- Pengembangan Melalui KDP	Rp.	6.287.442.500
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp.	300.000.000
- Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp.	353.282.000
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp.	236.374.000
- Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp.	18.900.000
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp.	12.649.460.363
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp.	178.481.000
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan	Rp.	(52.210.075.816)
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp.	(3.612.462.569)
- Reklasifikasi Keluar	Rp.	(263.202.349.963)
- Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp.	(56.324.000)
- Hibah (Keluar)	Rp.	(3.289.075.000)
- Transfer Keluar	Rp.	(679.823.000)
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(250.012.000)
- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(18.900.000)
- Penghapusan	Rp.	(44.050.700)
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp.	(238.774.000)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp.	(4.070.726.744)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp.	(442.139.819)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	11.780.818.390.655
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	11.780.818.390.655

Peralatan dan Mesin
Rp
17.061.491.481.142,-

C.14. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 17.061.491.481.142,- dan Rp 16.878.479.162.888,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 16.878.479.162.888
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	Rp. 153.227.082.489
- Transfer Masuk	Rp. 420.081.387.914
- Pengembangan Nilai Aset	Rp. 11.022.128.306
- Saldo Awal	Rp. 13.196.206.703
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp. 157.194.681.613
- Reklasifikasi Masuk	Rp. 269.917.564.340
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp. 7.136.909.415
- Pengembangan Melalui KDP	Rp. 5.926.153.600
- Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp. 505.745.700
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp. 4.755.425.525
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp. 5.665.490.180
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Pencatatan	Rp. (126.331.589.580)
- Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	Rp. (976.888.181)
- Penghapusan (semester II dokumen semester I)	Rp. (126.507.170)
- Penghapusan	Rp. (8.308.367.814)
- Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	Rp. (288.255.156)
- Transfer Keluar	Rp. (399.620.667.014)
- Reklasifikasi Keluar	Rp. (262.027.141.562)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp. (14.745.000)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester I dokumen TAYL)	Rp. (177.050.500)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp. (172.300.000)
- Hibah (Keluar)	Rp. (277.508.000)
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp. (315.364.000)
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp. (66.854.248.653)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp. (125.824.901)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 17.061.491.481.142
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp. (10.061.328.463.557)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp. 7.000.163.017.585

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan **C.15. Gedung dan Bangunan**
Rp 7.091.879.825.039,-

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 7.091.879.825.039,- dan Rp 6.304.702.199.357,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 6.304.702.199.357
Mutasi Tambah :	
- Transfer Masuk	Rp. 7.265.937.500

- Koreksi Kesalahan input IP	Rp.	18.422.962.246
- Pengembangan Melalui KDP	Rp.	45.966.290.768
- Saldo Awal	Rp.	4.938.177.895
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp.	209.848.034.527
- Pengembangan Nilai Aset	Rp.	8.969.942.118
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp.	6.508.249.542
- Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp.	346.471.206.058
- Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	Rp.	2.993.881.535
- Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	11.205.446.899
- Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp.	99.344.770.000
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp.	144.983.841
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp.	34.784.802.989
- Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp.	3.713.865.725
- Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp.	428.286.000
- Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	684.692.000
- Reklasifikasi Masuk	Rp.	40.968.106.249
- Pembelian	Rp.	175.581.089.374
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp.	2.915.764.468
- Hibah (Masuk)	Rp.	2.250.659.591
- Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	Rp.	128.751.300
- Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp.	644.791.962
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp.	4.183.770.433
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp.	57.694.000
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp.	(17.932.794.000)
- Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp.	(40.462.694.261)
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp.	(18.995.194.683)
- Koreksi Pencatatan	Rp.	(37.857.191.896)
- Reklasifikasi Keluar	Rp.	(38.661.185.624)
- Penghapusan	Rp.	(27.769.444.587)
- Hibah (Keluar)	Rp.	(201.629.000)
- Transfer Keluar	Rp.	(6.587.902.500)
- Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	Rp.	(201.620.000)
- Penghapusan (semester II dokumen semester I)	Rp.	(262.306.512)
- Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp.	(46.721.000)
- Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	Rp.	(304.045.000)
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(315.527.000)
- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(644.791.962)
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp.	(39.073.976.100)
- Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap	Rp.	(2.732.357.000)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp.	(9.195.150.213)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	7.091.879.825.039
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	(918.495.047.222)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	6.173.384.777.817

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
23.203.656.313.171,-

C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 23.203.656.313.171,- dan Rp 22.381.707.391.665,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	22.381.707.391.665
Mutasi Tambah :		
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp.	359.747.235
- Koreksi Kesalahan input IP	Rp.	808.499.583.715
- Saldo Awal	Rp.	94.224.745.826
- Pengembangan Melalui KDP	Rp.	229.225.068.629
- Reklasifikasi Masuk	Rp.	668.325.800.232
- Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp.	1.160.722.000
- Koreksi atas Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp.	3.006.118.000
- Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp.	24.937.888.800
- Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp.	8.523.496.184
- Pengembangan Nilai Aset	Rp.	5.050.978.500
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp.	243.295.607.510
- Transfer Masuk	Rp.	91.547.608.000
- Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	Rp.	44.553.993.000
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp.	4.205.086.000
- Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp.	33.297.002.000
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp.	32.691.974.290
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp.	62.836.478.459
- Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp.	18.210.541.000
- Hibah (Masuk)	Rp.	854.006.135
- Pembelian	Rp.	424.868.700
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp.	287.700.937.953
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan	Rp.	(526.338.824.788)
- Reklasifikasi Keluar	Rp.	(719.019.690.687)
- Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	Rp.	(39.745.635.780)
- Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp.	(56.163.783.856)
- Transfer Keluar	Rp.	(91.547.608.000)
- Transaksi Normalisasi BMN	Rp.	(18.258.186.150)
- Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	(1.023.105.000)
- Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp.	(125.367.862.973)
- Penghapusan	Rp.	(1.115.367.090)
- Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	Rp.	(1.792.062.970)
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp.	(62.470.745.760)
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(3.576.303.000)
- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp.	(27.944.006.800)
- Hibah (Keluar)	Rp.	(4.489.281.000)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp.	(161.844.072.858)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp.	(286.793.950)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	23.203.656.313.171
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	(3.282.441.248.165)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	19.921.215.065.006

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp 44.686.110.058,-

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 44.686.110.058,- dan Rp 43.226.472.933,-.

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	43.226.472.933
Mutasi Tambah :		
- Saldo Awal	Rp.	1.497.750.000
- Pembelian	Rp.	187.536.125
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp.	172.040.000
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan	Rp.	(397.684.000)
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp.	(5.000)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	44.686.110.058
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	(12.192.727.290)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	32.493.382.768

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp 13.525.736.144.844,-

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 13.525.736.144.844,- dan Rp 10.627.916.314.306,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	10.627.916.314.306
Mutasi Tambah :		
- Perolehan/Penambahan KDP	Rp.	251.621.723.743
- Pengembangan KDP	Rp.	3.629.240.639.148
- -	Rp.	5.869.556.000
- Transfer Masuk KDP	Rp.	36.351.270.000
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen TAYL)	Rp.	(4.208.485.193)
- Hibah Keluar KDP	Rp.	(64.516.743.500)
- Koreksi Nilai KDP	Rp.	(244.618.913)
- Transfer Keluar KDP	Rp.	(36.351.270.000)
- Pengembangan Melalui KDP	Rp.	(287.404.955.497)
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp.	(632.537.285.250)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	13.525.736.144.844
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	13.525.736.144.844

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp
14.274.457.486.234,-

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp 14.274.457.486.234,- dan Rp 11.871.070.815.180,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKM. PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1.	Tanah	11.780.818.390.655	0	11.780.818.390.655
2.	Peralatan dan Mesin	17.061.491.481.142	10.061.328.463.557	7.000.163.017.585
3.	Gedung dan Bangunan	7.091.879.825.039	918.495.047.222	6.173.384.777.817
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.203.656.313.171	3.282.441.248.165	19.921.215.065.006
5.	Aset Tetap Lainnya	44.686.110.058	12.192.727.290	32.493.382.768
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.525.736.144.844	0	13.525.736.144.844
AKUMULASI PENYUSUTAN		72.708.268.264.909	14.274.457.486.234	58.433.810.778.675

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp
401.218.575.000,-

C.20. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 401.218.575.000,- dan Rp 398.486.218.000,-. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan aset Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang dimanfaatkan oleh pihak Ketiga melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset. Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

NO	URAIAN	NILAI
1.	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PROBOLINGGO	Rp. 392.060.676.000
2.	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE	Rp. 6.425.542.000
3.	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN POLEWALI	Rp. 2.732.357.000
Nilai Jumlah Perolehan per 31 Desember 2020		Rp. 401.218.575.000

Aset Tak Berwujud Rp
512.170.217.993,-

C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 512.170.217.993,- dan Rp 454.695.973.270,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
1.	Software	Rp. 141.379.433.701
2.	Hasil Kajian/Penelitian	Rp. 159.157.591.374
3.	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp. 211.633.192.918
Saldo per 31 Desember 2020		Rp. 512.170.217.993
-	Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2020	Rp. (99.310.386.702)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp. 412.859.831.291

*Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp
13.566.289.300,-*

C.22. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 13.566.289.300,- dan Rp 19.282.994.250,-. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud yang belum memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset yaitu belum bisa digunakan untuk operasional. Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
1.	DKI JAKARTA	Rp. 7.260.888.250
2.	JAWA BARAT	Rp. 152.851.050
3.	SULAWESI UTARA	Rp. 5.247.750.000
4.	MALUKU UTARA	Rp. 904.800.000
Nilai Jumlah Perolehan per 31 Desember 2020		Rp. 13.566.289.300

*Aset Lain-Lain Rp
490.258.835.971,-*

C.23. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 490.258.835.971,- dan Rp 481.045.004.904,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 481.045.004.904
Mutasi Tambah :	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp. 169.833.987.739
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	Rp. (3.787.058.063)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp. (6.156.530.017)
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp. (33.847.039.591)
- Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	Rp. (323.485.421)
- Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	Rp. (241.548.824)

- Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp.	(425.647.800)
- Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp.	(239.437.934)
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp.	(20.475.055.900)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	Rp.	(66.863.000)
- Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp.	(47.773.138.818)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp.	(491.798.000)
- Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp.	(665.754.900)
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp.	(46.126.798.404)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	490.258.835.971
- Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp.	(233.498.185.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp.	256.760.650.971

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 353.754.265.380,-

C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 353.754.265.380,- dan Rp 350.250.907.356,-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKM. PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
A.	Asset Tak Berwujud			
1.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	401.218.575.000	21.138.303.678	380.080.271.322
2.	Software	141.379.433.701	99.117.776.702	42.261.656.999
3.	Hasil Kajian/Penelitian	159.157.591.374	0	159.157.591.374
4.	Aset Tak Berwujud Lainnya	211.633.192.918	0	211.633.192.918
5.	Aset Tak Berwujud Dalam Penyerjaan	13.566.289.300	0	13.566.289.300
JUMLAH		926.955.082.293	120.256.080.380	806.699.001.913
B.	ASSET LAIN-LAIN	0	0	0
6.	Asset Lain-lain	490.258.835.971	233.498.185.000	256.760.650.971
JUMLAH		490.258.835.971	233.498.185.000	256.760.650.971
TOTAL		1.417.213.918.264	353.754.265.380	1.063.459.652.884

Uang Muka dari KPPN Rp (65.204.207.-)

C.25. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp (65.204.207.-) dan Rp (243.211.026.-) Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tam bahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kanwil adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TH 2020	TH 2019
1.	BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	0	(103.417.000)
2.	BA(022) ES1(04) ACEH	(27.870.607)	0
3.	BA(022) ES1(04) SUMATERA UTARA	0	(100.000.000)
4.	BA(022) ES1(04) RIAU	(19.333.600)	0
5.	BA(022) ES1(04) JAMBI	0	(33.000.000)
6.	BA(022) ES1(04) MALUKU	0	(1.073.526)
7.	BA(022) ES1(04) NTT	0	(2.500)
8.	BA(022) ES1(04) GORONTALO	0	(5.718.000)
9.	BA(022) ES1(04) IRIAN JAYA BARAT	(18.000.000)	0
JUMLAH		(65.204.207)	(243.211.026)

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp
(3.086.240.444.-)

C.26. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp (3.086.240.444.-) dan Rp (5.293.213.945.-). Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp. (2.891.173.743)
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp. (167.303.355)
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp. (27.763.346)
TOTAL		Rp. (3.086.240.444)

Pendapatan Diterima
di Muka Rp 0,-

C.27. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>		
TOTAL	Rp. 0	

Hibah yang Belum
Disahkan Rp
(646.693.551.-)

C.28. Hibah yang Belum Disahkan

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp (646.693.551.-) dan Rp 0,-. Hibah yang Belum Disahkan merupakan pemberian dari pihak lain berupa barang atau uang yang diberikan kepada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut namun belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang/Uang Negara. Rincian Hibah yang Belum Disahkan disajikan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	Rp. (646.693.551)	Terdapat Hibah Langsung yang belum disahkan pada Satker Kenavigasian Pusat sebesar Rp646.693.551,-. Nilai tersebut didapat dari rekening per 31 Desember 2020 sebesar USD45.848,50 dengan Kurs Tengah BI sebesar Rp14.105,01. Kas tersebut belum dilakukan pengesahan karena tidak ada Kegiatan (DIPA Satker) Selama Tahun 2020. Satker akan melakukan Revisi DIPA dan pengajuan pengesahan hibah langsung jika di TA. 2021 terdapat kegiatan menggunakan dana hibah.
TOTAL	Rp. (646.693.551)	

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 0,-

C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang dalam jangka waktu tertentu lainnya atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>			
TOTAL		Rp. 0	

Ekuitas Rp 59.749.680.948.256,-

C.30. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 59.749.680.948.256,- dan Rp 56.952.495.482.080,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP Rp
(3.690.427.020.603.-)*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (3.690.427.020.603.-) dan Rp (3.821.719.999.022.-). Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(20.034.417.552)	(2.269.823.422)	782,64
2.	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	(2.520.000)	(334.000)	654,49
3.	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	(4.619.284.403)	(3.160.316.773)	46,17
4.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	(5.000.000)	0	0,00
5.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	0	0	0,00
6.	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0,00
7.	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	(2.286.703.399.800)	(2.374.780.284.149)	(3,71)
8.	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	(572.852.721.813)	(582.421.259.763)	(1,64)
9.	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	(250.919.427.527)	(256.805.256.801)	(2,29)
10.	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	(491.445.609.680)	(527.323.934.210)	(6,80)
11.	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	(61.269.467.827)	(62.895.777.599)	(2,59)
12.	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	0	0	0,00
13.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	(3.044)	(19.902)	(84,71)
14.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	(2.485.591.271)	(9.886.008.200)	(74,86)
15.	Pendapatan Denda Lainnya	(42.137.718)	(250.000)	16.755,09
16.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	(808.650)	(2.741.402)	(70,50)
17.	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	(43.050.000)	0	0,00
18.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	(3.581.318)	(193.803.161)	(98,15)
19.	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(1.949.401.229)	(100,00)
20.	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(30.788.411)	(100,00)
JUMLAH		(3.690.427.020.603)	(3.821.719.999.022)	(3,44)

Pendapatan Jasa berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan pendapatan lain-lain-LO merupakan dari transaksi tahun 2020.

Beban Pegawai Rp
1.715.775.702.835,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.715.775.702.835,- dan Rp 1.806.404.722.928,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Gaji Pokok PNS	623.778.441.381	632.513.267.912	(1,38)
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.354.490	9.869.825	(5,22)
3.	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51.090.340.783	51.700.121.228	(1,18)
4.	Beban Tunj. Anak PNS	16.294.842.655	16.416.405.603	(0,74)
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	8.902.703.300	8.992.889.825	(1,00)
6.	Beban Tunj. Fungsional PNS	342.760.000	319.045.000	7,43
7.	Beban Tunj. PPh PNS	788.301.779	812.617.145	(2,99)
8.	Beban Tunj. Beras PNS	37.640.364.500	38.601.786.570	(2,49)
9.	Beban Uang Makan PNS	119.632.119.925	115.757.181.393	3,35
10.	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	14.902.164.250	14.280.914.452	4,35
11.	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	476.725.000	497.625.000	(4,20)
12.	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.958.290.000	4.066.695.000	(2,67)
13.	Beban Tunjangan Umum PNS	33.022.521.075	34.065.932.750	(3,06)
14.	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	118.775.300	129.301.600	(8,14)
15.	Beban Uang Lembur	74.041.705.079	59.192.749.411	25,09
16.	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	730.776.293.318	829.048.320.214	(11,85)
JUMLAH		1.715.775.702.835	1.806.404.722.928	(5,02)

Beban Persediaan Rp
344.182.504.187,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 344.182.504.187,- dan 443.156.252.826,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Persediaan konsumsi	178.499.161.963	238.656.829.646	(25,21)
2.	Beban Persediaan amunisi	517.500	73.430.700	(99,30)

3.	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	26.450.400	122.691.300	(78,44)
4.	Beban Persediaan bahan baku	143.226.600.396	187.560.524.416	(23,64)
5.	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	919.824.656	252.190.693	264,73
6.	Beban persediaan lainnya	21.509.949.272	16.490.586.071	30,44
JUMLAH		344.182.504.187	443.156.252.826	(22,33)

Beban Barang dan
Jasa Rp
2.153.037.715.474,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.153.037.715.474,- dan Rp 1.955.196.495.545,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Keperluan Perkantoran	303.189.445.571	266.489.719.885	13,77
2.	Beban Pengadaan Bahan Makanan	13.731.478.645	62.287.758.605	(77,95)
3.	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.108.225.434	21.047.566.423	(47,22)
4.	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.262.593.828	6.025.640.878	(29,26)
5.	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.706.028.874	67.125.098.344	(2,11)
6.	Beban Barang Operasional Lainnya	8.140.025.883	10.501.918.324	(22,49)
7.	Beban Bahan	28.662.210.918	33.003.145.318	(13,15)
8.	Beban Honor Output Kegiatan	2.035.203.200	8.452.802.407	(75,92)
9.	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.488.907.702.659	1.218.905.409.073	22,15
10.	Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	2.221.680.000	0	0,00
11.	Beban Langganan Listrik	45.086.435.474	40.088.823.631	12,47
12.	Beban Langganan Telepon	6.678.560.460	9.124.187.136	(26,80)
13.	Beban Langganan Air	4.753.715.470	4.590.141.011	3,56
14.	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11.560.682.024	15.450.562.452	(25,18)
15.	Beban Jasa Pos dan Giro	1.642.118.601	11.201.600	14.559,68
16.	Beban Jasa Konsultan	66.488.612.162	68.272.836.362	(2,61)
17.	Beban Sewa	34.054.586.413	37.334.448.802	(8,79)
18.	Beban Jasa Profesi	6.967.965.000	6.712.225.800	3,81
19.	Beban Jasa Lainnya	46.051.036.900	76.417.065.590	(39,74)
20.	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.772.200.578	1.020.680.083	73,63
21.	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17.207.380	18.700.000	(7,98)
22.	Beban Barang Transito	0	1.500.000	(100,00)
23.	Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	2.305.300.000	(100,00)
24.	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	9.763.821	(100,00)

JUMLAH	2.153.037.715.474	1.955.196.495.545	10,12
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------

Beban Pemeliharaan
Rp 560.948.429.962,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 560.948.429.962,- dan Rp 622.989.853.324,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	URAIAN	TH 2020	TH 2019	% NAIK
1.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93.070.010.778	85.698.998.158	8,60
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	249.947.213	387.269.620	(35,46)
3.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	360.197.693.108	217.468.331.446	65,63
4.	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	13.544.871.190	173.224.589.312	(92,18)
5.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.530.579	284.280.000	(72,02)
6.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	23.615.282.766	78.565.873.783	(69,94)
7.	Beban Pemeliharaan Jaringan	639.271.168	511.207.268	25,05
8.	Beban Pemeliharaan Lainnya	242.935.000	802.892.400	(69,74)
9.	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11.167.324.450	10.726.096.607	4,11
10.	Beban Persediaan suku cadang	58.141.563.710	55.304.014.730	5,13
11.	Beban Pemeliharaan Irigasi	0	16.300.000	(100,00)
	JUMLAH	560.948.429.962	622.989.853.324	(9,96)

Beban Perjalanan
Dinas Rp
255.413.654.781,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 255.413.654.781,- dan Rp 516.146.948.438,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

	URAIAN	TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Perjalanan Biasa	183.747.936.653	373.837.387.615	(50,85)
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.491.780.431	18.910.234.755	50,67
3.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.240.688.050	20.475.312.974	(40,22)
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.537.155.187	82.706.684.544	(65,50)
5.	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.396.094.460	20.210.208.550	(88,14)
6.	Beban Perjalanan Tetap	0	7.120.000	(100,00)

JUMLAH	255.413.654.781	516.146.948.438	(50,52)
---------------	------------------------	------------------------	----------------

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 79.266.000,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	79.266.000	(100,00)
JUMLAH		0	79.266.000	(100,00)

*Beban Bantuan Sosial
Rp 0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>				
JUMLAH		0	0	0,00

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp
2.710.451.954.462,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.710.451.954.462,- dan Rp 2.806.400.218.839,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
--------	--	---------	---------	-------------------

1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.490.342.468.364	1.549.444.288.215	(3,81)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	292.192.461.857	297.389.533.115	(1,75)
3.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	504.019.591.860	479.425.488.482	5,13
4.	Beban Penyusutan Irigasi	393.832.186.260	445.765.073.264	(11,65)
5.	Beban Penyusutan Jaringan	4.099.094.925	4.261.841.268	(3,82)
6.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.593.890	5.000.000	191,88
7.	Beban Amortisasi Software	3.662.107.450	9.000.339.779	(59,31)
8.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	192.610.000	0	0,00
9.	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.016.401.694	6.541.372.575	7,26
10.	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	15.080.438.162	14.567.282.141	3,52
JUMLAH		2.710.451.954.462	2.806.400.218.839	(3,42)

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp 1.497.398.210,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.497.398.210,- dan Rp (13.179.645.956.-).

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.501.283.316	(16.873.101.923)	(108,90)
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(3.685.555)	3.815.402.611	(100,10)
3.	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(199.551)	(121.946.644)	(99,84)
JUMLAH		1.497.398.210	(13.179.645.956)	(111,36)

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Rp
60.067.183.888,-

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(3.943.194.271)	(2.844.428.143)	38,63
2.	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	98.214.821.955	1.416.322.209.971	(93,07)
3.	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(51.825.249.005)	(927.168.308.028)	(94,41)

4.	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17.620.805.209	24.627.906.390	(28,45)
JUMLAH		60.067.183.888	510.937.380.190	(88,24)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp. (3.943.194.271.-) **D.12 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut masing-masing Rp (3.943.194.271.-) dan Rp (2.844.428.143.-)

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	(123.621.697)	(22.119.999)	458,87
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(1.865.993.022)	(1.241.998.583)	50,24
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(1.953.579.552)	(1.580.309.561)	23,62
JUMLAH		(3.943.194.271)	(2.844.428.143)	38,63

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 98.214.821.955,- **D.13 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut masing-masing Rp 98.214.821.955,- dan Rp 1.416.322.209.971,-

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Kerugian Pelepasan Aset	98.214.821.955	1.416.322.209.971	(93,07)
JUMLAH		98.214.821.955	1.416.322.209.971	(93,07)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. (51.825.249.005.-) **D.14 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut masing-masing Rp (51.825.249.005.-) dan Rp (927.168.308.028.-)

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	(233.265.360)	0	0,00
2.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	(38.677.528)	(87.833.152)	(55,96)
3.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	(806.194.099)	(344.367.890)	134,11

4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(45.617.828)	(68.083.060)	(33,00)
5.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(3.643.497.349)	(79.515.049.778)	(95,42)
6.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(15.757.114.109)	(30.933.275.113)	(49,06)
7.	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	(12.940.431)	0	0,00
8.	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	(31.287.942.301)	(101.215.587.197)	(69,09)
9.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	(7.000.000)	(100,00)
10.	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(714.997.111.838)	(100,00)
JUMLAH		(51.825.249.005)	(927.168.308.028)	(94,41)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 17.620.805.209,-

D.15 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut masing-masing Rp 17.620.805.209,- dan Rp 24.627.906.390,-

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
1.	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	17.617.839.209	23.135.409.547	(23,85)
2.	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	2.966.000	1.385.941.471	(99,79)
3.	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	106.555.372	(100,00)
JUMLAH		17.620.805.209	24.627.906.390	(28,45)

D.16 POS-POS LUAR BIASA

Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019

URAIAN		TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
<i>Tidak ada transaksi untuk saat ini.</i>				
JUMLAH		0	0	0,00

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp
56.952.495.482.080,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 56.952.495.482.080,- dan Rp 54.166.454.218.892,-.

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp
(4.609.062.654.068,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar Rp (4.608.977.392.317,-) dan Rp (4.826.542.950.710,-). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp 0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp 0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp
11.695.532.778,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 11.695.532.778,- dan Rp 4.358.493.776,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan (c1)

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI KOREKSI
1.	Bahan Baku	163.789.156
2.	Bahan untuk Pemeliharaan	7.150.000
3.	Barang Konsumsi	168.940.210
4.	Persediaan Lainnya	11.082.124.031
5.	Persediaan yang Belum Diregister	(4.770.619)
6.	Suku Cadang	278.300.000
JUMLAH		11.695.532.778

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp
1.190.880.978.476,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.190.880.978.476,- dan Rp 625.635.619.456,-.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap (c2)

NO	JENIS ASET TETAP	NILAI KOREKSI
1.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.954.444.719
2.	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(23.475.943.003)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	30.529.604.493
4.	Gedung dan Bangunan	315.400.561.627
5.	Irigasi	90.261.445.795
6.	Jalan dan Jembatan	722.517.570.267
7.	Tanah	21.693.294.578
JUMLAH		1.190.880.978.476

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp (140.918.399.187.-).

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp (140.918.399.187.-) dan Rp 1.267.453.361.408,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020 (c2)

NO	JENIS ASET TETAP	NILAI KOREKSI
1.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.497.750.000)
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27.299.226.477
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.206.159.854
4.	Akumulasi Penyusutan Irigasi	70.487.747.163
5.	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(37.560.135.751)
6.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.443.776.220
7.	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	100.710.000
8.	Aset Tetap Renovasi	1.497.750.000
9.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(49.496.438.763)
10.	Beban Kerugian Pelepasan Aset	226.730.785
11.	Gedung dan Bangunan	55.568.077.259
12.	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	48.124.392
13.	Irigasi	(244.241.560.833)
14.	Jalan dan Jembatan	(110.586.653.157)
15.	Jaringan	(16.618.000)
16.	Jaringan Belum Diregister	16.618.000
17.	Konstruksi Dalam pengerjaan	(4.453.104.106)
18.	Peralatan dan Mesin	(108.847.529.735)
19.	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(4.663.041.139)
20.	Persediaan yang Belum Diregister	27.649.850
21.	Tanah	624.968.081.639
22.	Transfer Masuk	(486.446.219.342)
JUMLAH		(140.918.399.187)

Koreksi Lain-lain Rp 3.946.038.607,-.

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 3.946.038.607,- dan Rp (15.389.044.000.-). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain (c3)

NO	JENIS BEBAN	NILAI KOREKSI
1.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	167.723
2.	Persediaan yang Belum Diregister	3.622.360.000
3.	Transfer Keluar	207.858.654
4.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	115.652.230
JUMLAH		3.946.038.607

*Transaksi Antar Entitas
Rp 6.320.261.052.707,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 6.320.261.052.707,- dan Rp 5.711.537.952.344,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

NO	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
1.	Ditagihkan ke Entitas Lain	9.513.422.842.201
2.	Diterima dari Entitas Lain	(3.711.055.508.075)
3.	Transfer Keluar	(347.210.225.576)
4.	Transfer Masuk	834.272.737.775
5.	Pengesahan Hibah Langsung	29.793.839.591
6.	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.037.366.791
JUMLAH		6.320.261.052.707

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp (3.711.055.508.075.-) sedangkan DKEL sebesar Rp 9.513.508.103.952,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 834.272.737.775,- Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp (347.210.225.576.-) terjadi selisih sebesar Rp(487.062.512.199,-) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

LAMPIRAN

BEDA TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK	

-	TRANSFER KELUAR	347.210.225.576
-	TRANSFER MASUK	834.272.737.775
	BEDA TRANSFER	-487.062.512.199
1	KSOP Patimban	
	Transfer Masuk dari LMAN melalui Satker Konsolidasi Kementerian Perhubungan berupa Tanah	486.446.219.342
2	Disnav Palembang	
	Transfer Masuk dari BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp663.700.000,- beserta penyusutannya sebesar (Rp47.407.143,-)	616.292.857
	SISA BEDA	0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 29.793.839.591,-. Sedangkan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.037.366.791,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN

NO	PENERIMA HIBAH	BENTUK HIBAH	NILAI PENGESAHAN
1.	KSOP BANJARMASIN	Gedung Kantor & Barang	Rp. 2.375.659.591
2.	KSOP FAK-FAK	Tanah	Rp. 1.000.000.000
3.	KSOP PALEMBANG	Tanah	Rp. 20.000.000
4.	KSOP BENOA	Tanah	Rp. 21.822.980.000
5.	UPP BULI	Tanah	Rp. 4.575.200.000
Total Pengesahan Hibah Langsung			Rp. 29.793.839.591
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp. 0
JUMLAH			Rp. 29.793.839.591

LAMPIRAN

NO	PENERIMA HIBAH	BENTUK HIBAH	NILAI PENGESAHAN
1.	KSOP Tanjung Buton	Tanah	Rp. 1.037.366.791
Total Pengesahan Hibah Langsung TAYL			Rp. 1.037.366.791
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp. 0
JUMLAH			Rp. 1.037.366.791

Ekuitas Akhir Rp
59.749.680.948.256,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 59.749.680.948.256,- dan Rp 56.952.495.482.080,-.

INFORMASI LAINNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN TA. 2020

A. Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- a. Target PNBP TA 2020 sebesar Rp.3.452.310.586.000,-
- b. Pencapaian target PNBP TA 2020 Rp.3.711.055.508.075,- (107,49%)

2. Jumlah realisasi penyetoran PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2020 Semester II sebesar Rp.3.711.055.508.075,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. PNBP Non Fungsional : Rp. 54.092.752.671,-
- b. Fungsional : Rp. 3.656.962.755.404,-
 - 1) Jasa Kenavigasian : Rp. 573.040.644.803,-
 - 2) Perkapalan : Rp. 250.917.198.787,-
 - 3) Jasa Transportasi Lainnya : Rp. 61.181.440.056,-
 - 4) Kepelabuhanan : Rp. 2.280.520.754.926,-
 - 5) Konsesi : Rp. 491.302.716.832,-

3. Penggunaan Perairan

- a. Dasar Hukum:
 - 1) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
 - 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Mekanisme pemungutan PNBP Penggunaan Perairan:
 - 1) Penggunaan perairan termasuk dalam PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya;
 - 2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan perjanjian penggunaan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - 3) Tarif untuk penggunaan perairan Rp.2.500,- per m²;
 - 4) Termin pembayaran perjanjian penggunaan perairan dilaksanakan setiap tahun sesuai periode dalam perjanjian;
 - 5) Pengguna jasa yang tidak melakukan pembayaran pada saat nota tagihan dikeluarkan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang tertuang dalam nota tagihan;
 - 6) Untuk pelayanan jasa yang menggunakan perjanjian seperti penggunaan perairan, penentuan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Konsesi

- a. Dasar Hukum:
 - 1) PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - 2) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
 - 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Pengertian:
- Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, disebutkan bahwa:
- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
 - 2) Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- c. Mekanisme pelaksanaan konsesi:
- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi;
 - 2) Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
 - 3) Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
 - 4) Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;
 - 5) Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
 - 6) Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015;
 - 7) Pada tahun 2015 Ditjen Hubla melalui Penyelenggara Pelabuhan telah mengadakan perjanjian
 - 8) Konsesi dengan PT. Pelindo (Persero) I s.d. IV, dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a) Konsesi dengan BUP BUMN:
 - i. Konsesi pengusahaan pelabuhan eksisting;

- ii. Konsesi perusahaan pelabuhan non eksisting.
- b) Konsesi dengan BUP Non BUMN.
- 9) Besaran konsesi minimal 2,5% dari pendapatan kotor BUP;
- 10) Jangka waktu pelaksanaan konsesi antara 30 (tiga puluh) s.d. 70 (tujuh puluh) tahun;
- 11) Jenis-jenis kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan:

No	Jasa Keperluan	Segmen	Objek Konsesi
1.	Kapal	a. Tambat b. Air kapal c. <i>Bunker</i> BBM	Pendapatan Bruto Pendapatan Bruto setelah dikurangi biaya pembelian air jika sumber air bukan berasal dari PT. Pelindo Pendapatan <i>bunker fee</i> setelah dikurangi harga BBM ke Pertamina/ <i>supplier</i> .
2.	Barang	Dermaga, gudang, lapangan penumpukan.	Pendapatan Bruto
3.	Terminal Peti kemas	Paket, penumpukan, operasi lapangan, operasi CFS, dermaga, <i>reefer</i> , jasa lainnya.	Pendapatan bruto
4.	Terminal kendaraan	Seluruh segmen	Pendapatan bruto
5.	Terminal	Curah kering, curah cair, gas, Ro-ro	Dari pendapatan setelah dikurangi upah/biaya TKBM
6.	PBM/Bongkar muat konvensional (petikemas dan <i>general cargo</i>)	a. <i>Stevedoring, cargodoring, receiving/delivery.</i> b. Kerjasama PBM	a. Dari pendapatan setelah dikurangi upah/biaya TKBM. b. Dari pendapatan <i>sharing</i> atau berdasarkan nota tagihan
7.	rupa-rupa usaha	a. Pas penumpang b. Pas masuk pelabuhan c. Kerjasama alat d. Perusahaan alat	a. pendapatan bruto b. pendapatan bruto c. dari pendapatan <i>sharing/retribusi</i> atau nota tagihan d. pendapatan bruto

- 1) Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi yaitu:
 - a) Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
 - b) Jasa pemanduan dan penundaan kapal karena sudah menjadi komponen PNPB di dalam PP No. 15 tahun 2016 sebagai pungutan kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada BUP/Pengelola Tersus sebesar 5%.

- 2) Kepala Otoritas Pelabuhan Utama melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
 - 3) Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) dilakukan tiap bulan di tempat masing-masing kantor penyelenggara pelabuhan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagan Hukum dan KSLN; Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
 - 4) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagian Keuangan dan Bagian Hukum dan KSLN;
 - 5) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
 - 6) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran;
 - 7) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode ini akan dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) Perjanjian Konsesi yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
 - 8) Pembayaran PNBP hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;
 - 9) Perhitungan PNBP hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
 - 10) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada pembayaran triwulan berikutnya;
- d. Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- 1) Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BUMN (PT. Pelindo I sd IV), terdiri dari:
 - a) **Konsesi pada pelabuhan eksisting**, dilakukan berdasarkan perjanjian:
 - Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT. Pelindo I:
Nomor Perjanjian HK.107/1/2/OP.BLW-2015 dan US.12/2/9/PI-15.TU tanggal 9 Nopember 2015.

- Addendum I Nomor: HK.107/1/4/OP.BLW-2016 dan UM.58/22/8/PI-16.TU tanggal 16 Juni 2016.
- Addendum II Nomor: HK.107/1/2/OP.BLW-2017 dan UM.58/33/9/PI-17.TU tanggal 12 Juli 2017.
- Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan PT. Pelindo II:
Nomor Perjanjian HK.107/1/7/OP.TPK-15 dan HK. 566/11/11/1/PI.II-15 tanggal 11 Nopember 2015
Addendum Nomor: HK.107/1/1/OP.TPK-16 dan HK. 566/15/7/3/PI.II-16 tanggal 15 Juli 2016.
- Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III:
Nomor Perjanjian HK.107/01/12/OP.TP-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 Nopember 2015
Addendum Nomor: HK.107/01/12/OP.TP-16 dan HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016.
- Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar dengan PT. Pelindo IV:
Nomor Perjanjian HK. 107/07/01/OP.MKS-15 dan 1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
Addendum Nomor: HK. 107/13/02/OP.MKS-17 dan 5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Pebruari 2017.

b) **Konsesi non eksisting**, dilakukan berdasarkan perjanjian:

- Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Pelabuhan Utama Belawan (PT. Pelindo I):
Nomor perjanjian HK. 107/1/2/OP.BLW-2015 dan US.12/2/9/PI-15 TU tanggal 9 Nopember 2015.
- Konsesi Pengusahaan Dermaga Terminal Curah Cair Pelabuhan Kuala Tanjung (PT. Pelindo I):
Nomor Perjanjian HK. 107/1/1/KSOP.KTG-15 dan US.15/1/7/PI-15.JU tanggal 23 Januari 2015.
- Konsesi Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (PT. Pelindo II):
Nomor perjanjian Addendum kedua HK.107/1/10/OP.TPK-15 dan HK.566/29/12/2/PI.II/15 tanggal 29 Desember 2015.
- Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) (PT. Pelindo III): Nomor Perjanjian HK.107/01/05/OP.TPR-14 dan HK.0501/75/P.III-2014 tanggal 8 Mei 2014.
- Konsesi Pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Surabaya (PT. Pelindo III):
Nomor perjanjian HK.107/01/06/OP.TPR-15 dan HK.0501/95/P.III-2015 tanggal 19 Mei 2015.
- Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar *New Port* Tahap I di Makassar (PT. Pelindo IV):
Nomor perjanjian HK. .107/07/12/OP.TPR-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
- Konsesi Pengusahaan Terminal Kijing di Pontianak (Pelindo II) (KSOP Pontianak dan PT. Pelindo II) Juli 2018 dengan nilai investasi sebesar ±14,45 Triliun, fee konsesi 2,5%, dan jangka waktu 69 Tahun

- 2) Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Non BUMN terdiri dari:
- a) PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan KSOP Marunda:
Nomor Perjanjian HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 dan 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
 - b) PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan KSOP Banten:
Nomor Perjanjian HK.107/2/2/KSOP.Bln-16 dan HK.02.01/052.01/DU/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.
 - c) PT. Wahyu Samudera Indah (WSI) dengan KSOP Talang Duku Jambi:
Nomor perjanjian WSI/KPS/KEMENHUB/HUBLA/66/150976/2016 dan PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016 tanggal 27 Oktober 2016
 - d) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI) dengan KSOP Marunda:
Nomor perjanjian HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 dan 008/PTI-DIR/KSOP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
 - e) PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ) dengan KSOP Banten
Nomor perjanjian HK.107/2/6/KSOP.Btn-2020 tanggal 23 Juli 2020
 - f) PT. Indo Container Sarana (ICS) dengan KSOP Pontianak
Nomor Perjanjian PP.008/1/6/KSOP.PTK/18 tanggal 14 Maret 2018
 - g) PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS) dengan KSOP Gresik
Nomor perjanjian HK.107/01/10/ Ksop.Gsk-2017 tanggal 15 Desember 2017
 - h) PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) dengan KSOP Probolinggo
Nomor perjanjian PP.002/1/17/KSOP-Pbl-17 tanggal 21 Desember 2017
 - i) PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) dengan KSOP Banjarmasin
Nomor Perjanjian PP.008/01/01/KSOP.BJM.18 tanggal 15 September 2015
 - j) PT. Pelabuhan Swangi Indah (SWI) dengan KSOP Kotabaru
Nomor Perjanjian KL.003/01/14/KSOP.KBBL-19 tanggal 4 Oktober 2019
 - k) PT. Sarana Abadi Lestari dengan KSOP Samarinda
 - l) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan KSOP Samarinda
Nomor Perjanjian AL.302/6/11/KSOP.SMD-2020 tanggal 4 Desember 2020
 - m) PT. Lamongan Intergrated Shorebase dengan UPP Brondong
Nomor perjanjian HK.201/1/14/UPP.BRG-2020 tanggal 25 Juli 2020
 - n) PT. Siam Maspion Terminal dengan KSOP Gresi
- e. Konsesi pada PT. Pelindo I sd IV sudah dilakukan sejak periode dimulainya perjanjian dan sudah dilakukan pembayaran setiap 3 bulan sekali.
- f. PNBP yang berasal dari pendapatan Konsesi Pelabuhan sebanyak 21 (dua puluh satu) perjanjian dengan uraian sebagai berikut:

No	Penyelenggara Pelabuhan (Satker)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Konsesi	Nilai Investasi	Concession Fee
1	OP Tg. Priok & PT Pelindo II	Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok – 31 Agustus 2012	70 Tahun	± 11,7 T	0,5 %
2	OP Belawan & PT. Pelindo I	Terminal Petikemas Belawan Fase II 350m – 04 April 2014	70 Tahun	± 2,3 T	0,5 %
3	OP Belawan & PT. Pelindo I	Terminal Curah Cair Pelabuhan Kuala Tanjung (Jan 2015) dan Addendum Terminal Murtipurpose - 16 November 2016	69 Tahun	± 3,8 T	2,5 %
4	OP Tanjung Perak & PT. Pelindo III	Terminal Multipurpose Teluk Lamong – 19 Mei 2015	72 Tahun	± 23 T	2,5 %
5	OP Tanjung Perak & PT. Pelindo III	Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya – 08 Mei 2014	25 Tahun	± 730 M	3,5 %
6	OP Makassar & PT. Pelindo IV	Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I – 19 Mei 2015	70 Tahun	± 1,89 T	2,5 %

7	KSOP Talang Duku & PT. Wahyu Samudra Indah	Terminal Petikemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku – Oktober 2016	66 Tahun	± 700 M	5 %
8	KSOP Banten & PT. Krakatau Bandar Samudera	Terminal Cigading di Pelabuhan Banten – Oktober 2016	75 Tahun	± 662 M	3 %
9	KSOP Marunda & PT. Karya Citra Nusantara	Terminal PT. Karya Citra Nusantara – November 2016	70 Tahun	± 1 T	5 %
10	KSOP Marunda & PT. Pelabuhan Tegar Indonesia	Terminal Marunda Centre – Mei 2017	65 Tahun	± 2 T	2,75 %
11	KSOP Gresik & PT. Berlian Manyar Sejahtera	Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik – Desember 2017	76 Tahun	± 32 T	2,75 %
12	KSOP Probolinggo & PT. Delta Artha Bahari Nusantara	Terminal DABN di Pelabuhan Probolinggo – Desember 2017	64 Tahun	± 1,3 T	2,75 %
13	KSOP Pontianak & PT. Indo Kontainer Sarana	Terminal Indo Kontainer – Maret 2018	61 Tahun	± 1,07 T	5,5 %
14	KSOP Pontianak & PT. Pelindo II	Terminal Kijing – Juli 2018	69 Tahun	±14,45T	2,5 %
15	KSOP Banjarmasin & PT. Indonesia Multipurpose Terminal	Terminal Taboneo -	49 Tahun	± 617 M	4,5 %
16	KSOP Kotabaru & PT. Pelabuhan Swangi Indah	Terminal PT. Pelabuhan Swangi Indah – Oktober 2019	21 Tahun	±159,6M	5 %
17	KSOP Samarinda & PT. Sarana Abadi Lestari	Terminal PT. Sarana Abadi Lestari – Juni 2020	37 Tahun	±150,5M	5 %
18	KSOP Banten & PT. Bandar Bakau Jaya	Terminal PT. Bandar Bakau Jaya – Juli 2020	73 Tahun	±829,1M	3,5%
19	UPP Brondong & PT. Lamongan Integrated Shorebase	Terminal Tanjung Parkir (Pelabuhan Brondong) – Juli 2020	72 Tahun	±1,5T	2,75 %
20	KSOP Gresik & PT. Siam Maspion Terminal	PT. Siam Maspion Terminal – Agustus 2020	43 Tahun	±465M	2,5 %
21	KSOP Samarinda & PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara	25 Tahun	±470M	5 %

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, bahwa *consession fee* sekurang-kurangnya sebesar 2,5% dari pendapatan bruto (Pasal 43).

g. Sesuai hasil rekonsiliasi konsesi, realisasi pendapatan Konsesi Ditjen Hubla sebagai berikut:

1) Realisasi Peyetoran PNPB Konsesi TA 2020 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Peyetoran Konsesi Rp.491.260.148.232,-
- Salah input akun
- KSOP Sorong Rp. 1.319.800,-
- UPP Sikakap Rp. 49.800,-
- UPP Tanah Paser Rp. 41.199.000,-
- Jumlah Total Peyetoran (MAK 425518) Rp. 491.302.716.832,-

Penjelasan:

- KSOP Sorong
Terdapat kesalahan kode akun yang seharusnya masuk kedalam jasa PUJK masuk kedalam Jasa Konsesi.
- UPP Sikakap
Terdapat kesalahan akun penyetoran yang seharusnya masuk kedalam Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya, masuk kedalam Jasa konsesi.
- UPP Tanah Paser
Terdapat setoran Jasa Konsesi sebesar Rp.41.199.000,- di UPP Tanah Paser. Sesuai dengan informasi dari Direktorat Kepelabuhanan di UPP Tanah Paser sampai dengan per 31 Desember 2020 belum ada proses pengajuan permohonan Konsesi di UPP Tanah Paser. Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meminta konfirmasi akan setoran tersebut.

2) Realisasi penyetoran PNBK Konsesi pada pelabuhan umum yang dikelola Pelindo dan Non Pelindo TA. 2020 sebesar Rp.491.260.148.232,- dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pelindo	Rp. 463.402.084.396,-
➤ Non Pelindo	<u>Rp. 27.858.063.836,-</u>
➤ Jumlah	Rp. 491.302.716.832,-

3) Realisasi penyetoran PNBK Konsesi TA 2020 pada pelabuhan Umum yang dikelola oleh PT. Pelindo I s.d. IV yang eksisting dan non eksisting dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pelindo I	Rp. 47.579.010.342,-
➤ Pelindo II	Rp. 201.970.602.664,-
➤ Pelindo III	Rp, 169.155.246.211,-
➤ Pelindo IV	<u>Rp. 44.697.225.179,-</u>
➤ Jumlah	Rp. 463.402.084.396,-

4) Realisasi Konsesi PNBK Kepelabuhanan non Pelindo TA. 2020 sebagai berikut:

No.	Nama BUP	Penyetoran TA 2020	Keterangan
1	PT. KARYA CITRA NUSANTARA (KCN)	5.632.762.897	
2	PT. PELABUHAN TEGAR INDONESIA (PTI)	4.798.951.384	
3	PT. INDO CONTAINER SARANA (ICS)	1.451.906.815	
4	PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDRA (KBS) - TERMINAL CIGADING	8.705.551.788	
5	PT. BANDAR BAKAU JAYA (BBJ) - TERMINAL PT. BANDAR BAKAU JAYA	115.274.905	
6	PT. BERLIAN MANYAR SEJAHTERA (BMS) - TERMINAL MANYAR	2.333.381.562	
7	PT. DELTA ARTHA BAHARI NUSANTARA (DABN)	768.853.040	
8	PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE (LIS)	460.349.561	
9	PT. INDONESIA MULTI PURPOSE INDONESIA (IMPT)	2.271.272.861	
10	PT. SARANA ABADI LESTARI (SAL)	1.319.759.023	
	JUMLAH	27.858.063.836	

- 5) Realisasi penyeteroran Jasa Konsesi per Triwulan TA 2020 adalah sebagai berikut:
- Triwulan IV Tahun 2019 Rp. 118.155.988.868,-
 - Triwulan I Tahun 2020 Rp. 120.082.389.110,-
 - Triwulan II Tahun 2020 Rp. 117.735.932.620,-
 - Triwulan III Tahun 2020 Rp. 113.102.882.298,-
 - Kurang Bayar Tahun sebelumnya Rp. 2.182.955.336,-
 - Jumlah Rp. 491.260.148.232,-

Perincian Kurang Bayar Konsesi Tahun sebelumnya terdiri dari:

No.	UPT	Kurang Bayar	Keterangan
1	KSOP KUALA LANGSA	1.365.721	Konsesi Kurang Bayar 2018 dan 2019
2	KSOP LHOKSEUMAWE	5.624.106	Konsesi Kurang Bayar 2018 dan 2019
3	KSOP MEULABOH	1.136.428	Konsesi Kurang Bayar 2018 dan 2019
4	KSOP SIBOLGA	8.181.609	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2018 dan 2019
5	KSOP KUALA TANJUNG	28.680.126	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2018 dan 2019
6	KSOP DUMAI	305.387.925	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
7	KSOP PEKANBARU	32.507.021	Konsesi Kurang Bayar Tahun Feb 2018 & Des 2019
8	KSOP KUALA CINAKU	4.917.585	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2018 & 2019
9	KSOP KIJANG	17.554.803	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
10	KSOP TANJUNG PANDAN	31.238.934	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2018 & 2019
11	OP UTAMA TANJUNG	131.886.536	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
		53.583.131	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
		179.291.949	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
12	KSOP PROBOLINGGO	1.923	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
13	KSOP TANJUNG WANGI	23.860.268	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
14	KSOP BANJARMASIN	1.327.520.626	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
15	KSOP BENOA	23.879.164	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
16	KSOP LEMBAR	1.573.903	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
17	KSOP WAINGAPAU	4.763.578	Konsesi Kurang Bayar Tahun 2019
	Jumlah	2.182.955.336	

5. Jasa Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel)

- a. Jasa telekomunikasi pelayaran merupakan bagian dari PNPB Jasa kenavigasian.
- b. Jasa Telkompel terdiri dari:
 1. *Vessel Traffic Services (VTS)*;
 2. *Jasa Telegram/telepon radio/radio telex/radio maritime latter.*
- c. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/34/18/DJPL-16 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Penerapan PNPB Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Services (VTS)*, Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/*Radio Telex/Radio Maritime Letter* dan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

disebutkan bahwa apabila telah dilakukan penarikan PNBP Jasa Kenavigasian VTS pada pelabuhan dan/atau di dalam DLKr/DLKp pelabuhan, maka penarikan PNBP Jasa Telegram/Telepon Radio berupa *Mastercable* tidak perlu dilakukan lagi mengingat berita yang disampaikan ke VTS sudah mencakup berita dalam *Mastercable*.

d. Daftar stasiun SROP / VTS:

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
1	Disnav Belawan – VTS Belawan			
	1. Syahbandar Belawan	√	-	
	2. KSOP Kuala Tanjung	-	√	
2	Disnav Dumai – VTS Dumai	√	-	
	1. KSOP Dumai	√	-	
3	Disnav Tg. Pinang	-	√	
	1. Kanpel Batam VTS Center Batam	√	-	
	2. KSOP Tg. Balai Karimun	√	-	
	3. UPP Tanjung Uban	√	-	
	4. KSOP Kijang	-	√	
	5. KSOP Tanjung Pinang	-	√	
	6. UPP Dabo Singkep	-	√	
	7. UPP Senayang	-	√	
	8. UPP Tarempa	-	√	
4	Disnav Teluk Bayur – VTS Teluk Bayur	√	-	
	1. KSOP Teluk Bayur	√	-	
5	Disnav Palembang – VTS Palembang	√	-	
	1. KSOP Palembang	√	-	
	2. KSOP Muntok	√	-	
	3. KSOP Pangkal Balam	-	√	
	4. KSOP Tanjung Pandan	-	√	
	5. KSOP Muara Sabak	-	√	
	6. KSOP Jambi	-	√	
7. KSOP Kuala Tungkal	-	√		
6	Disnav Tanjung Priok – VTS Jakarta	√	-	
	1. Syahbandar Tanjung Priok	√	-	
	2. KSOP Sunda Kelapa	√	-	
	3. KSOP Marunda	√	-	
	4. KSOP Muara Baru	√	-	
	5. KSOP Kalibaru	√	-	
7	VTS Merak – Master Cable	√	-	
	1. UPP Bojonegara	√	-	
	2. UPP Karangantu	√	-	
	3. UPP Labuhan	√	-	
	4. UPP Anyer	√	-	
	5. KSOP Pulau Baai Bengkulu	-	√	

8	VTS – Panjang	√	-	
9	Disnav Semarang – VTS Semarang	√	-	
	1. KSOP Semarang	√	-	
10	Disnav Surabaya – VTS Surabaya	√	-	
	1. Syahbandar Surabaya	√	-	
	2. KSOP Gresik	√	-	
11	Disnav Benoa – VTS Benoa	√	-	
12	VTS Lembar	√	-	
13	Disnav Pontianak – VTS Pontianak	√	-	
	1. KSOP Pontianak	√	-	
14	Disnav Banjarmasin – VTS Banjarmasin	√	-	
	1. KSOP Banjarmasin	√	-	
15	VTS Batulicin	√	-	
16	Disnav Samarinda – VTS Samarinda	√	-	
	1. KSOP Samarinda	√	-	
17	VTS Balikpapan	√	-	
18	Disnav Makassar – VTS Makassar	√	-	
19	Disnav Bitung – VTS Bitung	√	-	
	1. KSOP Gorontalo	-	√	
	2. UPP Pantoloan	-	√	
20	Disnav Sorong – VTS Sorong	√	-	
	1. UPP Bintuni	√	-	

6. Piutang PNBP

a. Total piutang PNBP TA. 2020 sebesar Rp.**42.999.382.456,-** dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Lancar Rp. 27.851.706.033,-.
- 2) Kurang lancar Rp. 38.400.000,-
- 3) Diragukan Rp. 13.336.500,-
- 4) Macet Rp. 15.095.939.923,-

b. Sebagian besar piutang PNBP termasuk kategori lancar yang merupakan piutang kontribusi jasa pandu/tunda kepada PT. Pelindo I, II, III dan IV (Persero) yang sudah dibayarkan periode Januari 2021 terdiri dari:

1). Piutang Pandu Tunda Pelindo I:

- a) OP Belawan : Rp. 539.936.518,-
- b) KSOP Pangkalan Susu : Rp. 158.217.764,-
- c) KSOP Lhokseumawe : Rp. 7.464.780,-
- d) KSOP Kuala Tanjung : Rp. 115.648.165,-
- e) KSOP Dumai : Rp. 1.495.776.964,-
- f) KSOP Pekan Baru : Rp. 149.981.901,-
- g) KSOP Tanjung Balai Karimun : Rp. 174.656.395,-
- h) KSOP Sei Kolak Kijang : Rp. 5.501.460,-

i) UPP Tanjung Uban	: Rp.	23.144.165,-
j) KSOP Batam	: Rp.	302.468.015,-
k) UPP Sambu	: Rp.	7.810.066,-
l) KSOP sei Pakning	: Rp.	112.822.633,-
m) KSOP Tembilahan	: Rp.	11.899.225,-
n) KSOP Kuala Enok	: Rp.	892.607,-
o) KSOP Malahayati	: Rp.	26.288.203,-
p) KSOP Sibolga	: Rp.	2.869.624,-
2). Piutang Pandu Tunda Pelindo II ;		
a) KSOP Talang Duku Jambi	: Rp.	39.516.577,-
b) KSOP Muara Sabak	: Rp.	26.881,-
3). Piutang Pandu Tunda Pelindo III:		
a) Otoritas Pelabuhan Surabaya	: Rp.	1.175.662.222,-
b) KSOP Bena	: Rp.	53.411.203,-
c) KSOP Kota Baru	: Rp.	696.068.804,-
d) KSOP Sampit	: Rp.	69.888.581,-
e) UPP Satui	: Rp.	82.294.077,-
4). Piutang Pandu Tunda Pelindo IV:		
a) Otoritas Pelabuhan Makassar	: Rp.	271.207.662,-
b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Malili	: Rp.	9.000.000,-
c) KSOP Balikpapan	: Rp.	2.733.779.858,-
d) Unit Penyelenggara Pelabuhan Tana Paser	: Rp.	167.819.400,-
e) KSOP Samarinda	: Rp.	888.179.738,-
f) KSOP Bitung	: Rp.	83.204.006,-
g) KSOP Ambon	: Rp.	147.826.091,-
h) Unit Penyelenggara Pelabuhan Dobo	: Rp.	11.764.480,-
i) KSOP Sorong	: Rp.	37.376.438,-
j) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomako	: Rp.	119.973.808,-
k) KSOP Jayapura	: Rp.	17.804.222,-
l) KSOP Tarakan	: Rp.	211.712.723,-
m) Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang2	: Rp.	113.926.660,-
n) KSOP Kendari	: Rp.	16.379.495,-
o) Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe	: Rp.	174.801.528,-
p) Unit Penyelenggara Pelabuhan Bau-Bau	: Rp.	3.496.753,-
q) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonedale	: Rp.	878.996.910,-
r) KSOP Ternate	: Rp.	3.286.405,-
s) KSOP Biak	: Rp.	8.541.149,-
t) KSOP Merauke	: Rp.	4.174.387,-
u) KSOP Pare-pare	: Rp.	20.037.194,-
v) Unit Penyelenggara Pelabuhan Garongkong	: Rp.	10.458.285,-
w) KSOP Manokwari	: Rp.	41.250.902,-
x) KSOP Fak-fak	: Rp.	2.614.230,-
y) KSOP Nunukan	: Rp.	26.684.061,-
z) KSOP Gorontalo	: Rp.	21.181.525,-
aa) Unit Penyelenggara Pelabuhan Anggrek	: Rp.	5.728.000,-
bb) Unit Penyelenggara Pelabuhan Sangatta	: Rp.	1.153.067.000,-
cc) KSOP Bontang	: Rp.	354.751.700,-
dd) Unit Penyelenggara Pelabuhan Amurang	: Rp.	59.901.772,-
ee) Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Uki	: Rp.	52.690.130,-

ff) KSOP Tanjung Redep	: Rp. 101.506.662,-
gg) KSOP Toli-toli	: Rp. 889.545,-
hh) Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk	: Rp. 263.996.518,-
ii) KSOP Bontang (SBU Marine)	: Rp. 282.116.700,-
jj) Unit Penyelenggara Pelabuhan Sangkulirang	: Rp. 498.390.240,-

- c. Piutang Kantor Pusat termasuk katagori piutang lancar, piutang kantor pusat adalah piutang PNBP dari Debitur PT. Pelni (Persero) sebesar Rp. 5.449.289.173,75,- dengan US\$ 3.741,15 dengan Rate Bank Indonesia per 30 Juni 2020 US\$ = Rp. 14.105,- = Rp. 52.768.920,75,- sehingga piutang kantor pusat secara keseluruhan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.449.289.173,75,-
- d. Piutang yang termasuk dalam kategori macet ada di 4 (empat) satker senilai Rp. 14.685.618.724,- sebagai berikut :
- 1). Piutang pada Kantor KSOP Kuala Langsa dikatagorikan macet sebesar Rp. 1.564.963.335,-(Jasa Kepelabuhanan) merupakan piutang dari debitur PT. Blue Sky Langsa LTD. Dikarenakan Perusahaannya yang menyewa penguasaan perairan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2017;
 - 2). UPP Buli.
Piutang macet pada Kantor UPP Buli sebesar Rp. 78.042.000,- merupakan piutang dari PT. Pelni (Persero) periode tahun 2005 s.d. 2009 . Piutang ini sesuai dengan PP NO. 14 Tahun 2000. Seharusnya untuk piutang PNBP sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2000 di catat dan di tagihkan oleh kantor pusat Ditjen Hubla setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) antara kantor pusat, UPT dan kantor pusat PT. Pelni (Persero). Untuk piutang PT. Pelni (Persero) pada UPP Buli tidak termasuk dalam coklit tersebut sehingga piutang nya tetap tercatat di UPT yang bersangkutan. Ditjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor UPP Buli Nomor KU. 201/1/4/DJPL-17 tanggal 2 Pebruari 2017 perihal Piutang PNBP PT. PELNI (Persero) yang meminta kepada UPP Buli untuk segera menyampaikan aksi lanjut atau langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - 3). UPP Tarempa
 - a) Piutang macet pada Kantor UPP Tarempa sebesar Rp. 10.820.931.830,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Peralahan Arnebatara Natuna.
 - b) Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang Marine Terminal Nomor KU.404/1/06/UPP-TPA-2016 Tanggal 17 Februari 2016.
 - c) Pada tanggal 25 Oktober 2016 Kantor UPP Tarempa menyurati PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai Pembayaran Tagihan PNBP Penggunaan Perairan Tersus Udang dengan rincian sebagai berikut :

- periode tahun 2011 s.d 2014	Rp 109.968.338,42
- periode tahun 2015	Rp 1.761.052.794,33
- periode tahun 2016	Rp 3.923.812.500,00
 - d) Pada tanggal 9 Desember 2016 PT. Peralahan Arnebatara Natuna hanya melakukan pembayaran berdasarkan tarif sewa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 dengan tagihan PNBP periode tahun 2011 s.d 2014 sebesar Rp 109.968.338,42
 - e) Pada tanggal 14 Februari 2017 Kantor UPP Tarempa menerima surat tembusan dari Dirjen Hubla mengenai Pengenaan Tarif Atas Penggunaan Perairan TAC PEP – PT. Peralahan Arnebatara Natuna yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat UM.002/5/18/DJPL-17 Tanggal 13 Januari 2017. Yang dimana pada lampiran-lampiran surat tersebut dapat diketahui ketidakanggupan PT. Peralahan Arnebatara Natuna untuk pembayaran PNBP penggunaan perairan

tersebut dikarenakan perubahan tarif sewa pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2015.

- f) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti surat dari PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai peninjauan kembali tarif penggunaan perairan dengan nomor surat Pp.002/6/12/DJPL-17 tanggal 5 Juli 2017.
 - g) Pada tanggal 14 Juli 2017 Presdir PT. Peralahan Arnebatara Natuna menerbitkan Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kantor UPP Tarempa untuk melaksanakan lifting dan berkomitmen menjalankan operasi sesuai aturan yang berlaku, serta siap untuk tidak diberikan pelayanan apabila tidak memenuhi kewajiban yang tercantum pada surat pernyataan tersebut.
 - Pada tanggal 5 Nopember 2017 Kepala Kantor UPP Tarempa menyampaikan surat kepada PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai tindak lanjut dalam rangka penertiban administrasi terminal khusus udang marine terminal. Dikarenakan PT. Peralahan Arnebatara Natuna tidak memenuhi kewajibannya. Sampai dengan saat ini PT. Peralahan Arnebatara Natuna belum melakukan pembayaran tagihan PNBPN yang dinyatakan sebagai piutang macet dengan rincian sebagai berikut :

- periode tahun 2015	Rp 1.761.052.794,33
- periode tahun 2016	Rp 3.923.812.500,00
- periode tahun 2017	Rp 3.923.812.500,00
- <u>periode semester I 2018</u>	<u>RP 1.212.254.036,00</u>
Total	Rp.10.820.931.830,00
 - h) Pada tanggal 13 Juni 2019 sudah diadakan rapat kembali terkait pembahasan penggunaan perairan dengan PT. PAN yang dipimpin oleh Sesditjen Hubla
 - i) Pada Tanggal 18 Juni 2019 rapat ulang pembahasan luasan penggunaan perairan PT. PAN yang dipimpin oleh UPP. Tarempa di Kantor Pusat dari hasil keputusan rapat tersebut belum ada hasil dan sudah bersurat ke Direktorat Kepalabuhanan Tanggal 19 Juni 2019 perhitungan ulang 18 Juli 2019 peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu DitjenHubla untuk perhitungan luasan penggunaan perairan
 - j) Hasil peninjauan lapangan dengan luas perairan 1.536.992 m2 dengan jumlah penggunaan perairan tahun 2015/2019 Rp.6.045.741.679,-
 - k) Kantor UPP. Tarempa pada tanggal 27 September 2019 telah berkirim surat kepada PT. PAN perihal Tindak lanjut hasil peninjauan lapangan dalam rangka perhitungan luas penggunaan perairan di Tersus Udang Natuna.
- 4). Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak
- Piutang macet pada OP Tanjung Perak sebesar Rp.2.397.002.239,- Untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), dengan kronologis sebagai berikut :
- a) 23 Desember 2015
penandatanganan perjanjian kerjasama kantor otoritas pelabuhan utama Tg. Perak dengan PT. DPS
 - b) 19 Januari 2016
OP Tg. Perak menerbitkan surat kepada PT. DPS untuk segera melaksanakan pembayaran penggunaan perairan periode I TA. 2015
 - c) 18 Pebruari 2016
OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode I (26 Maret s/d 31 Desember 2015)
 - d) 29 Pebruari 2016
Surat peringatan untuk PT. DPS segera melaksanakan pelunasan pembayaran penggunaan perairan periode I TA. 2015
 - e) 29 Maret 2016
OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode II (01 Januari s/d 31 Desember 2016)
 - f) 30 maret 2016

Surat pemberitahuan pengenaan denda kepada PT. DPS atas penangguhan pembayaran penggunaan perairan tahun 2015 dengan denda sebesar 2% sesuai pp nomor 29 tahun 2009

- g) 3 Mei 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 246.697.538,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2016
- h) 10 juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 251.631.489,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2016
- i) 10 juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) sebesar Rp. 314.160.224,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juni 2016
- j) 30 Juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 256.664.119,- dan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juli 2016
- k) 30 Juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp. 320.443.429,- dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 juli 2016
- l) 21 Juli 2016
PT. DPS baru mengirimkan surat balasan/tanggapan terhadap surat-surat yang telah kantor OP kirimkan dengan mengajukan permohonan skema pembayaran pelunasan penggunaan perairan dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran penggunaan perairan periode I (TA. 2015) dan periode II (TA. 2016) dengan alasan mengalami kesulitan likuiditas
- m) 2 Agustus 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 261.797.401,- dan tanggal jatuh tempo 27 agustus 2016
- n) 2 Agustus 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp. 326.852.298,- dan tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2016
- o) 25 Agustus 2016
Kantor OP Tg. Perak membuat surat balasan atas surat dari PT. DPS tanggal 21 Juli 2016 yang pada dasarnya kantor OP Tg. Perak tetap mengharuskan PT. DPS melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian penggunaan perairan dan untuk penghapusan denda keterlambatan menunggu arahan dari kantor pusat DJPL
- p) 29 Nopember 2016
Kantor OP Tg. Perak kembali mengirinkan surat kepada PT. DPS bahwa denda keterlambatan tidak bisa dihapuskan dan segera melaksanakan pembayaran tagihan periode 2015 dan 2016
- q) 6 Januari 2017
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp. 649.916.832,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 24 Januari 2017 dan periode II tanggal 23 Januari 2017
- r) 20 Januari 2017
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode Ili (01 Januari s/d 31 Desember 2017)
- s) 30 Januari 2017
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp. 662.915.169,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 23 Pebruari 2017 dan periode II tanggal 22 Pebruari 2017
- t) 7 Pebruari 2017
Manajemen PT. DPS di undang ke kantor OP Tg. Perak untuk membahas pembayaran penggunaan perairan periode I dan II

- u) 16 Pebruari 2017
Surat dari PT. DPS mengenai permohonan skema pelunasan pembayaran penggunaan perairan TA. 2015 s/d 2017 dan dilampirkan laporan keuangan PT. DPS tahun 2013-2015
- v) 14 Maret 2017
OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal arahan pembayaran penggunaan perairan PT. DPS tahun 2015, 2016 dan 2017
- w) 6 April 2017
OP Tg. Perak mengirimkan surat kepada PT. DPS perihal penyerahan audit Laporan Keuangan oleh auditor independen untuk rencana pembayaran penggunaan perairan PT. DPS
- x) 19 April 2017
PT. DPS menyampaikan surat laporan hasil audit dan permohonan jangka waktu pembayaran kepada kantor OP Tg. Perak
- y) 2 Mei 2017
OP Tg. Perak menghadiri undangan dari kantor pusat Kemenhub tentang pembahasan permasalahan pembayaran PNBPN penggunaan perairan PT. DPS dan PT. dumas dengan hasil risalah rapat bahwa kantor OP Tg. Perak harus melakukan koordinasi dengan KPPN setempat
- z) 15 Mei 2017 kantor OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal hasil koordinasi mengenai pembayaran penggunaan perairan PT. DPS antara kantor OP Tg. Perak dengan Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur
- aa) 31 Oktober 2017
Berita Acara rekonsiliasi piutang PNBPN penggunaan perairan PT. DPS per 31 Oktober 2017
- bb) 27 Nopember 2017
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan :
 - periode tahun 2015 sebesar Rp.359.391.730 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2017
 - periode tahun 2016 sebesar Rp. 448.698.162 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2017
 - periode tahun 2017 sebesar Rp.368.088.774 jatuh tempo tanggal 19 Desember 2017
- cc) 27 Desember 2017
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan :
 - periode tahun 2015 sebesar Rp.366.579.564 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2018
 - periode tahun 2016 sebesar Rp. 457.672.125 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2018
 - periode tahun 2017 sebesar Rp.375.450.550 jatuh tempo tanggal 19 Januari 2018
- i. Sesuai hasil rapat di Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 4 September 2017 bahwa tindak lanjut ke Kementerian Keuangan tentang permohonan keringanan pembayaran penggunaan perairan akan dilakukan setelah ada ijin operasional PT. DOK dan Perkapalan Surabaya dan untuk tagihan tahun 2017 harus tetap dibayar sambil mengurus surat ijin tersebut.
- ii. Sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk tagihan TA. 2017 oleh PT. DOK dan Perkapalan Surabaya.
- iii. Pada tanggal 6 Nopember 2018 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan hasil piutang akan tetap dihitung ditambah dengan denda sambil menunggu audit dari BPKP.
- iv. Piutang Macet PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)/PT. DPS. DPS Posisi sd. 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.120.832.253 (periode 2015-2019)
- v. Tindak Lanjut terhadap piutang PT. DPS tersebut yaitu:

- vi. Rapat koordinasi antara Kantor OP. Utama Tanjung Perak dengan PT. DPS menghadirkan BPKP Provinsi Jawa Timur, KPKNL dan Biro Keuangan Kemenhub pada tanggal 28 Oktober 2019
- vii. Kantor OP . Utama Tanjung Perak terkait penghapusan piutang PT. DPS harus ada audit BPKP dan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub;
- viii. PT. DPS menyampaikan bahwa telah mengalami kerugian selama 9 tahun terakhir dan sedang dalam proses restrukturisasi;
- ix. Atas permohonan penghapusan piutang PT. DPS dari BPKP menyampaikan bahwa PT. DPS harus mengajukan ke instansi terkait yang kemudian akan dimintakan audit ke BPKP;
- x. Biro Keuangan menyampaikan bahwa terkait piutang PT. DPS sesuai PP. Nomor 14 tahun 1985 harus melalui BPKP, Inspektorat, KPKNL dan Kemenhub;
- xi. KPKNL menyatakan terkait piutang PT. DPS dapat diselesaikan antara Kantor OP. Utama Tanjung Perak dengan PT. DPS;
- xii. Kantor OP. Utama Tanjung Perak telah melaporkan hasil rapat terakhir pembahasan piutang penggunaan peraira PT. DOK dan Perkapalan Surabaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Kepala Kantor OP. Utama Tanjung Perak Nomor KU.102/08/12/OP.TPr-19 tanggal 7 November 2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Piutang PNBPT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Perserp) periode 2015-2019, dari surat tersebut belum ada arahan lebih lanjut.
- xiii. Kantor OP. Utama Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kepada BPKP Provinsi Jawa Timur agar dapat dilakukan audit secara menyeluruh terkait Laporan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Atas segala biaya yang timbul dari audit tersebut dibebankan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) melalui Surat Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak Nomor KU.501/01/09/OP.TPr-2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Audit, dari surat tersebut belum terdapat balasan.

B. Kerjasama Pemanfaatan BMN

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan;
- e. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete

2. MEKANISME PELAKSANAAN KSP

- a. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Kerjasama Pemanfaatan BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
- 1) Klasifikasi 1 Berupa:
 - a) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ; dan/ atau
 - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) Klasifikasi 2 berupa:
 - a) tanah dan/ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;dan/atau
 - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Klasifikasi 3 berupa:
 - a) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 4) Klasifikasi 4 berupa:
 - a) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan/atau
 - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Persetujuan/penolakan usulan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi (Klasifikasi II) ; Kakanwil DJKN (Klasifikasi III) dan Kepala KPKNL (Klasifikasi IV).
 - 2) Kepala Kantor / UPT/ Satker/ KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen

(Klasifikasi I) ; tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi II - IV);

- 3) Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - 4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen (Klasifikasi I&II); Kakanwil DJKN (Klasifikasi III); KPKNL terkait (Klasifikasi IV)
 - 5) Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama (Klasifikasi III);
 - 6) Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi IV);
 - 7) Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait; (Klasifikasi I & 2)
 - 8) Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Klasifikasi II)
 - 9) Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi I);
 - 10) Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi II);
- d. Kerjasama pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - 2) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal pengadaannya;
 - 3) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang;
 - 4) Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
 - 1) kontribusi tetap; dan
 - 2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.
 - 5) Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara) dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan, yaitu:

- 1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
 - 2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
- e. Kerjasama pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah dilaksanakan pada KSOP Probolinggo dan KSOP Sintete, sedangkan yang sedang dalam proses pengusulan adalah KSOP Sorong, KSOP Ternate, KSOP Kendari, KSOP Biak, KSOP Lembar, KSOP Kupang, KSOP Tanjung Wangi, KSOP Pantoloan, KSOP Pare Pare, KSOP Manokwari, KSOP Merauke, KSOP Waingapu, KSOP Kalabahi, KSOP Badas, KSOP Ende, KSOP Fak Fak, KSOP Bitung dan KSOP Bima
- f. Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Probolinggo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan
- 1) Obyek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m² dan dermaga seluas 24.161,5 m² yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - 2) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara sebagaimana ditetapkan Pengguna Barang yang merupakan operator Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
 - 4) Kontribusi kepada negara berupa:
 - a) kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya; dan Kontribusi Tetap untuk tahun kedua adalah sebesar Rp 4.553.879.380,- (Empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)) sebagai berikut : :
 - i. Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. DABN sebesar Rp. 2.440.737.745,- NTPN 261211JNEPKMOFDT Tanggal 23-03-2020;
 - ii. Sharing Profit dari Pendapatan Bruto KSP PT. DABN sebesar Rp. 2.113.141.635,- NTPN 5D3DB2G4UK78ACLQ Tanggal 26-03-2020.
 - b) pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah). Penjualan (revenue) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit.
 - 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- g. Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Sintete dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete;
- 1) Obyek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m² terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Ds. Sintete, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp.8.115.306.000,00 (Delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - 2) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.
 - 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
 - 4) Kontribusi kepada negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap untuk tahun pertama adalah sebesar Rp 88,681.112,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. IPC Pelindo II Cabang Pontianak sebesar Rp. 65.405.023,- Nomor NTPN 233559729373;
 - ii. Sharing Profit dari Pendapatan Bruto KSP PT. IPC Pelindo II Cabang Pontianak masih dalam proses.
 - b) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000 (Satu milyar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). Net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.
 - 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 8) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 9) KSP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2020 dilaksanakan pada 3 Satker, diantaranya:

a) KSOP Probolinggo

Nilai Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp392.060.676.000,- dan Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp4.553.879.380,-. Nomor dan Tanggal Perjanjian KSP PP.002/1/1/KSOP.STT-17 dan HK.01/20/8/1/04.1/D5/C.PTK-17. Selain itu, Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Kemenkeu S-06/MK.6/WKN.11/2017 Tanggal 31 Juli 2017. Nama Mitra KSP PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak dengan Jangka Waktu 15 Tahun. Nilai BMN yang dikerjsamakan sebesar Rp8.115.306.000,- dengan Nilai PNBPN yang tercatat TA. 2020 sebesar Rp65.405.023,-.

b) KSOP Sintete

Nilai Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.425.542.000,- dan Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp65.405.023,-. Nomor dan Tanggal Perjanjian KSP PP.002/1/17/KSOP.Pbl-17 dan DIR.005/DABN/PERJ/XII/2017. Selain itu, Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Kemenkeu S-215/MK.6/2017 Tanggal 16 AGUSTUS 2017. Nama Mitra KSP PT. DELTA ARTHA BAHARI NUSANTARA (PT. DABN) dengan Jangka Waktu 30 Tahun. Nilai BMN yang dikerjsamakan sebesar Rp446.583.876.000,- dengan Nilai PNBPN Kontribusi Tetap yang tercatat TA. 2020 sebesar Rp2.440.737.745,- dan Pembagian Keuntungan sebesar Rp2.113.141.635,-.

C. KEGIATAN MYC

NO	SATKER / KEGIATAN	PAGU MULTIYEARS CONTRACT					KETERANGAN	SD
		2018	2019	2020	TOTAL	NILAI KONTRAK		
1	BIDANG KEPELABUHAN	42.111.987.000	371.558.840.000	116.243.287.000	529.914.114.000	298.352.975.514		
1	KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	-	17.727.000.000	3.773.000.000	21.500.000.000	18.591.910.983		
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Depapre (KDP) (Multi Years Contract)		17.727.000.000	3.773.000.000	21.500.000.000	18.591.910.983	Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 781.075.000,-	RM
2	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MASALEMBU	3.900.000.000	22.100.000.000	-	26.000.000.000	25.313.222.000		
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Masalembu (Multi Years Contract)	3.900.000.000	22.100.000.000		26.000.000.000	25.313.222.000	Realisasi TA. 2018 Rp.3.724.770.000,-	RM
3	KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK AIR	3.095.970.000	14.504.030.000	-	17.600.000.000	16.073.770.000		
	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Padang Tikar (KDP) (Multi Years Contract)	3.095.970.000	14.504.030.000		17.600.000.000	16.073.770.000	Realisasi TA. 2018 Rp.2.411.065.500,-	RM
4	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KINTAP	8.051.342.000	45.624.272.000	-	53.675.614.000	44.452.160.000		
	Pembangunan Pelabuhan Laut Pelaihari (KDP) (Multi Years Contract)	8.051.342.000	45.624.272.000		53.675.614.000	44.452.160.000	Realisasi TA. 2018 Rp.7.431.324.000,- Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 7.641.201.000,-	RM
5	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANGKULIRANG	16.594.000.000	58.240.000.000	-	74.834.000.000	68.448.900.000		
	Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy (KDP) (Multi Years Contract)	16.594.000.000	58.240.000.000		74.834.000.000	68.448.900.000	Realisasi TA. 2018 Rp.10.272.735.000,- Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 27.835.000,-	RM
6	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MELONGUANE	-	23.794.899.000	26.205.101.000	50.000.000.000	43.765.782.531		
	Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract)		23.794.899.000	26.205.101.000	50.000.000.000	43.765.782.531	Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 11.693.194.000,-	RM
7	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SERUI	-	26.775.000.000	4.725.000.000	31.500.000.000	26.824.235.000		
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (KDP) (Multi Years Contract)		26.775.000.000	4.725.000.000	31.500.000.000	26.824.235.000	Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 3.568.000.000,-	RM
8	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA	4.815.000.000	27.285.000.000	-	32.100.000.000	20.032.231.000		
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bui (Multi Years Contract)	4.815.000.000	27.285.000.000		32.100.000.000	20.032.231.000	Realisasi TA. 2018 Rp.4.766.097.000,- Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 1.202.940.000,-	RM
9	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T U L E H U	5.655.675.000	32.048.825.000	-	37.704.500.000	34.850.764.000		
	Perkuatan Dermaga Pelabuhan Tulehu (Multi Years Contract)	5.655.675.000	32.048.825.000		37.704.500.000	34.850.764.000	Realisasi TA. 2018 Rp.5.270.195.600,-	RM
10	KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PATIMBAN	-	7.500.000.000	42.500.000.000	50.000.000.000	-		
	Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional Pelabuhan Patimban Termasuk Supervisi		7.500.000.000	42.500.000.000	50.000.000.000			
11	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN N A B I R E	-	95.959.814.000	39.040.186.000	135.000.000.000	-		
	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut nabire		95.959.814.000	39.040.186.000	135.000.000.000			

II	BIDANG KENAVIGASIAN	18.431.647.908	82.789.598.092	-	101.221.246.000	88.899.684.494		
1	DISTRIK NAVIGASI MANADO/BITUNG	1.835.775.000	4.283.475.000	-	6.119.250.000	6.064.336.000		
	Peningkatan Menara suar Tg.Ambora dari 30M Rangka baja Galvanis menjadi 40M Beton bertulang (Multi Years Contract)	1.835.775.000	4.283.475.000		6.119.250.000	6.064.336.000	Realisasi TA. 2018 Rp.1.670.300.865,-	RM
2	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	2.234.991.000	5.214.983.000	-	7.449.974.000	6.352.268.500		
	Pekerjaan Pembangunan Ramsu 20M Laut di Pelabuhan Tanjung Api - Api dan di Tanjung Baginda (Multi Years Contract)	976.827.000	2.279.266.000		3.256.093.000	2.797.631.500	Realisasi TA. 2018 Rp.839.289.450,-	RM
	Pekerjaan Replacement 3 unit Ramsu 10M Laut di Kumbang Merah DSI 1460, Selat Jaran Merah DSI 1450 dan Karang Vansitrad DSI 1915 (Multi Years Contract)	1.258.164.000	2.935.717.000		4.193.881.000	3.554.637.000	Realisasi TA. 2018 Rp.1.066.391.280,-	RM
3	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK	4.600.000.000	18.400.000.000	-	23.000.000.000	19.343.747.500		
	Upgrade Peralatan VTS Merak (Multi Years Contract)	4.600.000.000	18.400.000.000		23.000.000.000	19.343.747.500	Realisasi TA. 2018 Rp.3.413.602.500,-	RM
4	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN	1.522.442.000	3.552.365.000	-	5.074.807.000	3.100.527.320		
	Pembangunan Ramsu Lungsuran Naga 3 Unit (Multi Years Contract)	1.522.442.000	3.552.365.000		5.074.807.000	3.100.527.320	Realisasi TA. 2018 Rp.1.477.771.680,-	RM
5	DISTRIK NAVIGASI UJUNG PANDANG	1.492.920.000	8.459.880.000	-	9.952.800.000	7.996.610.450		
	PENGEMBANGAN BREAK WATER MENARA SUAR DEBRIL (Multi Years Contract)	1.492.920.000	8.459.880.000		9.952.800.000	7.996.610.450	Realisasi TA. 2018 Rp.1.446.116.150,-	RM
6	DISTRIK NAVIGASI TELUK BAYUR	129.260.208	7.370.739.792	-	7.500.000.000	6.722.917.208		
	4. Pembangunan Gedung VTS Distrik Navigasi Klas II Teluk Bayur (Multi Years Contract)	129.260.208	7.370.739.792		7.500.000.000	6.722.917.208	Realisasi TA. 2018 Rp.0,-	RM
7	DISTRIK NAVIGASI KUPANG	1.038.499.000	2.423.165.000	-	3.461.664.000	3.749.029.100		
	Pembangunan Lampu Pelabuhan 20 Meter Darat Di Pelabuhan Lirang Konstruksi Beton (Multi Years Contract)	1.038.499.000	2.423.165.000		3.461.664.000	3.749.029.100	Realisasi TA. 2018 Rp.1.008.614.000,-	RM
8	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	13.189.700	15.276.579.300	-	15.289.769.000	14.980.527.700		
	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Konstruksi Beton di Pib Tambelan (1 Unit), Pib Subi (2 Unit), Pib P. Laut (1 Unit), Pib Serasan (2 Unit), Pib Midai (1 Unit) dan Rambu Suar Single Pipe 10 M Laut di Pib Selat Lampa (1 Unit) (Multi Years Contract)	13.189.700	15.276.579.300		15.289.769.000	14.980.527.700	Realisasi TA. 2018 Rp.13.189.700,- Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 181.731.000,-	RM
9	DISTRIK NAVIGASI CILACAP	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000	3.976.591.000		
	Pembangunan Fasilitas SBNP Pelabuhan Bojong Salawe Pangandaran (Multi Years Contract)		5.000.000.000		5.000.000.000	3.976.591.000	Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 0,-	RM
10	DISTRIK NAVIGASI JAYAPURA	1.017.900.000	2.375.100.000	-	3.393.000.000	3.282.463.716		
	Pembangunan Rambu Suar 10 Meter Laut(Red & Green ligh) Alur Masuk Pelabuhan. Miosnum 2 Unit (Multi Years Contract)	1.017.900.000	2.375.100.000		3.393.000.000	3.282.463.716	Realisasi TA. 2018 Rp.1.017.412.684,-	RM
11	DISTRIK NAVIGASI MERAUKE	1.168.188.000	2.725.772.000	-	3.893.960.000	2.925.042.000		
	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut, Single Pipe 4 Kaki Cahaya Merah dan Hijau di Sungai Maro Merauke (Multi Years Contract)	1.168.188.000	2.725.772.000		3.893.960.000	2.925.042.000	Realisasi TA. 2018 Rp.1.023.764.700,-	RM
12	DISTRIK NAVIGASI SAMARINDA	3.378.483.000	7.707.539.000	-	11.086.022.000	10.405.624.000		
	Pembangunan Ramsu Pelabuhan 30 M Darat (Konstruksi baja galvanis) di Pelb. Maloy dan Amborawang Samboja 2 Unit (Multi Years Contract)	1.215.093.000	2.835.219.000		4.050.312.000	3.691.624.000	Realisasi TA. 2018 Rp.1.107.487.200,- Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 144.562.000,-	RM
	Pembangunan Rambu Suar 10 M LAUT (Tanjung Aru, Benua Aru, Merah Alur Balikpapan, Muara Berau, Alur Kuala Samboja dan Penuntun Belakang Alur Kuala Samboja) (6 unit) (Multi Years Contract)	2.163.390.000	4.872.320.000		7.035.710.000	6.714.000.000	Realisasi TA. 2018 Rp.2.014.200.000,-	RM
III	BIDANG PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	-	19.453.490.000	64.546.510.000	84.000.000.000			
1	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	-	19.453.490.000	64.546.510.000	84.000.000.000			
	PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI KELAS III (Multi Years Contract)		19.453.490.000	64.546.510.000	84.000.000.000		Sisa Kontrak yang digunakan di Revisi-7 Rp. 51.946.510.000,-	RM
IV	BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	6.316.411.500	66.345.049.820	50.201.101.860	122.862.563.180			
1	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	6.316.411.500	66.345.049.820	50.201.101.860	122.862.563.180	-		
	Pembangunan dan Supervisi Kapal Pelabuhan Rakyat 20 Unit (Multi Years Contract)	6.316.411.500	49.013.946.340	19.930.858.160	75.261.216.000		Pekerjaan TA. 2019 tidak dilaksanakan, dikarenakan kapal pelra yang telah selesai harus dihibahkan terlebih dahulu ke pemda setempat	RM
	Lanjutan Pembangunan KM. Sabuk Nusantara 54		13.000.000.000	20.939.145.000	33.939.145.000		Proses Lelang	RM
	Pekerjaan Docking dan Supervisi KM. Sabuk Nusantara 45		4.331.103.480	9.331.098.700	13.662.202.180		Proses Lelang	

D. PENJELASAN SINGKAT AIDS TO NAVIGATION FUND (ANF)

1. Dalam rangka kerjasama 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, telah dibentuk forum kerjasama **Cooperative Mechanism** yang didasarkan pada kesepakatan **Ministerial Meeting di Batam tahun 2005, Jakarta Statement '2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement '2006** , serta **Singapore Statement '2007**, untuk mengaplikasikan **article 43 UNCLOS 1982** yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. *Cooperative Mechanism* memiliki 3 komponen, yaitu:
 - a. **Cooperation Forum (CF)**:
Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.
 - b. **Project Coordination Committee (PCC)**:
Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM
 - c. **Aids to Navigation Fund (ANF)**:
Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura.
3. *Aids to Navigation Fund (ANF)* merupakan salah satu Komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di selat Malaka & Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States* and *Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai issue-issue yang berkembang dalam pengelolaan ANF.
4. Mengingat pendanaan ANF yang bersifat sukarela, sehingga dana ANF menjadi sangat terbatas dan bersifat suplemen bagi 3 Negara Pantai. Adapun berdasarkan *User States and Stakeholder*, dana ANF hanya dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya yang terkait dengan pembangunan SBNP di Selat Malaka dan Singapura yang sebelumnya telah disetujui oleh 3 Negara Pantai pada pertemuan *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*;
 - b. Biaya yang terkait dengan perbaikan, perawatan terhadap SBNP di Selat Malaka dan Singapura seperti biaya pelatihan personil yang terlibat langsung dalam kegiatan perawatan SBNP, biaya pembelian suku cadang SBNP dan biaya operasional kegiatan perawatan SBNP.
 - c. Dana ANF tidak dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, akomodasi, ataupun biaya untuk menghadiri pertemuan baik yang terkait dengan ANF maupun yang tidak terkait dengan ANF.
5. Dalam pengoperasiannya, ketiga negara pantai mempunyai beberapa kewajiban yang harus disampaikan kepada komite ANF, antara lain:
 - a. Menyusun *Plan Maintenance Programme (PMP)* yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan SBNP maupun replacement SBNP dalam kurun waktu 10 tahun kedepan secara mandiri oleh masing-masing negara pantai. Forum TTEG akan membahas kajian PMP tersebut yang selanjutnya akan diajukan kepada komite ANF untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Melaksanakan kegiatan *Joint Inspection Round Work* setiap 6 bulan sekali bersama dengan *Performance Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF. Hasil dari *Joint*

Inspection Round Work harus disampaikan pada kepada komite ANF untuk dievaluasi;

- c. Menyusun laporan kegiatan perawatan dan pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Singapura serta menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*;
 - d. Menyampaikan laporan keuangan beserta bukti pembayaran kepada Sekretariat ANF. Selanjutnya Sekretariat ANF dan Independent Auditor yang ditunjuk oleh komite ANF akan mengevaluasi laporan keuangan beserta bukti pembayaran yang disampaikan oleh 3 negara pantai dan melaporkannya kepada komite ANF;
 - e. Menyusun program kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan PMP yang telah disetujui oleh komite ANF dan menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*.
6. Terdapat Saldo Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah pada Satker Kenavigasian Pusat sebesar Rp894.708.007,-. Nilai tersebut didapat dari rekening per 31 Desember 2020 sebesar USD63.431,93 dengan Kurs Tengah BI sebesar Rp14.105,01.
 7. Terdapat Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan pada Satker Kenavigasian Pusat sebesar Rp646.693.551,-. Nilai tersebut didapat dari rekening per 31 Desember 2020 sebesar USD45.848,50 dengan Kurs Tengah BI sebesar Rp14.105,01. Kas tersebut belum dilakukan pengesahan karena tidak ada Kegiatan (DIPA Satker) Selama Tahun 2020. Satker akan melakukan Revisi DIPA dan pengajuan pengesahan hibah langsung jika di TA. 2021 terdapat kegiatan menggunakan dana hibah.

E. PENGADAAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

1. Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut membangun kapal Pelayaran Rakyat yang akan diserahkan Ke Pemda Pemda di seluruh Indonesia. Dari 136 Kapal yang tercatat di Aplikasi Persediaan dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. 131 Kapal sudah diserahkan ke Pemda terkait
 - b. 2 Kapal masih tercatat karena menunggu terbit SK Penghapusan dengan Tanggal BAST 29 Desember 2020 yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Sumenep. Kapal tersebut yaitu Kapal Banawa Nusantara 121 dan Kapal Banawa Nusantara 122
 - c. 4 Kapal Terbakar dan akan dievaluasi lebih lanjut
Kapal tersebut yaitu Kapal Banawa Nusantara 38, Kapal Banawa Nusantara 40, Kapal Banawa Nusantara 43, dan Kapal Banawa Nusantara 44.
 - d. 1 Kapal Tenggelam dan akan dievaluasi lebih lanjut
Kapal tersebut yaitu Kapal Banawa Nusantara 49.

2. Rincian Kapal Pelra sebagai berikut:

No	Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)	Dasar Pelaksanaan Hibah		Penerima Hibah
				Naskah Perjanjian Hibah	Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Kapal Pelayaran Rakyat Hasil Pembangunan Tahun 2017						
1	000116	Kapal Banawa Nusantara 1	Rp 2.410.746.600	HK.107/1/17/DJPL-18	KU.807/2/12/DJPL-18	Kabupaten Belitung
2	000117	Kapal Banawa Nusantara 2	Rp 2.410.746.600	HK.107/1/18/DJPL-18	KU.807/2/13/DJPL-18	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
3	000118	Kapal Banawa Nusantara 3	Rp 2.410.746.600	HK.107/1/19/DJPL-18	KU.807/2/14/DJPL-18	Kabupaten Kepulauan Meranti
4	000119	Kapal Banawa Nusantara 4	Rp 2.410.746.600	HK.107/1/20/DJPL-18	KU.807/2/15/DJPL-18	Kabupaten Bintan
5	000120	Kapal Banawa Nusantara 5	Rp 2.410.746.600	HK.107/2/1/DJPL-18	KU.807/2/16/DJPL-18	Kabupaten Natuna
6	000121	Kapal Banawa Nusantara 6	Rp 2.447.612.000	HK.107/2/2/DJPL-18	KU.807/2/17/DJPL-18	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
7	000122	Kapal Banawa Nusantara 7	Rp 2.447.612.000	HK.107/2/3/DJPL-18	KU.807/2/18/DJPL-18	Kabupaten Mesuji
8	000123	Kapal Banawa Nusantara 8	Rp 2.447.612.000	HK.107/2/4/DJPL-18	KU.807/2/19/DJPL-18	Kabupaten Musi Banyuasin
9	000124	Kapal Banawa Nusantara 9	Rp 2.447.612.000	HK.107/2/5/DJPL-18	KU.807/2/20/DJPL-18	Kabupaten Selayar

10	000125	Kapal Banawa Nusantara 10	Rp	2.447.612.000	HK.107/2/6/DJPL-18	KU.807/3/1/DJPL-18	Kabupaten Bulukumba
11	000126	Kapal Banawa Nusantara 11	Rp	2.450.202.000	HK.107/2/7/DJPL-18	KU.807/3/2/DJPL-18	Kabupaten Situbondo
12	000127	Kapal Banawa Nusantara 12	Rp	2.450.202.000	HK.107/2/8/DJPL-18	KU.807/3/3/DJPL-18	Kabupaten Sumba Timur
13	000128	Kapal Banawa Nusantara 13	Rp	2.450.202.000	HK.107/2/9/DJPL-18	KU.807/3/4/DJPL-18	Kabupaten Sabu Raijua
14	000129	Kapal Banawa Nusantara 14	Rp	2.450.202.000	HK.107/2/10/DJPL-18	KU.807/3/5/DJPL-18	Kabupaten Rote Ndao
15	000130	Kapal Banawa Nusantara 15	Rp	2.396.756.300	HK.107/2/11/DJPL-18	KU.807/3/6/DJPL-18	Kabupaten Kepulauan Aru
16	000131	Kapal Banawa Nusantara 16	Rp	2.396.756.300	HK.107/2/12/DJPL-18	KU.807/3/7/DJPL-18	Kabupaten Morowali
17	000132	Kapal Banawa Nusantara 17	Rp	2.396.756.300	HK.107/2/13/DJPL-18	KU.807/3/8/DJPL-18	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
18	000133	Kapal Banawa Nusantara 18	Rp	2.396.756.300	HK.107/2/14/DJPL-18	KU.807/3/9/DJPL-18	Kabupaten Maluku Tenggara
19	000134	Kapal Banawa Nusantara 19	Rp	2.396.756.300	HK.107/2/15/DJPL-18	KU.807/3/10/DJPL-18	Pemerintah Kota Tual
20	000135	Kapal Banawa Nusantara 20	Rp	2.396.780.500	HK.107/2/16/DJPL-18	KU.807/3/11/DJPL-18	Kabupaten Minahasa Selatan
21	000136	Kapal Banawa Nusantara 21	Rp	2.406.882.480	HK.107/2/17/DJPL-18	KU.807/3/12/DJPL-18	Kabupaten Banggai Laut
22	000137	Kapal Banawa Nusantara 22	Rp	2.406.882.480	HK.107/2/18/DJPL-18	KU.807/3/13/DJPL-18	Kabupaten Banggai Kepulauan
23	000138	Kapal Banawa Nusantara 23	Rp	2.406.882.480	HK.107/2/19/DJPL-18	KU.807/3/14/DJPL-18	Kabupaten Seram Bagian Timur
24	000139	Kapal Banawa Nusantara 24	Rp	2.404.860.500	HK.107/2/20/DJPL-18	KU.807/3/15/DJPL-18	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

B. Kapal Pelayaran Rakyat Hasil Pembangunan Tahun 2018

25	000001	Kapal Banawa Nusantara 25	Rp	2.338.660.894	HK.201/9/1/DJPL/2019	PL.301/10/4/DJPL/2019	Kabupaten Mimika
26	000002	Kapal Banawa Nusantara 26	Rp	2.338.660.893	HK.201/9/2/DJPL/2019	PL.301/10/5/DJPL/2019	Kabupaten Simeulue
27	000003	Kapal Banawa Nusantara 27	Rp	2.341.288.245	HK.201/5/5/DJPL/2019	PL.301/5/19/DJPL/2019	Kota Makassar
28	000004	Kapal Banawa Nusantara 28	Rp	2.341.288.245	HK.201/5/6/DJPL/2019	PL.301/5/20/DJPL/2019	Provinsi Sulawesi Selatan
29	000005	Kapal Banawa Nusantara 29	Rp	2.329.706.194	HK.201/9/3/DJPL/2019	PL.301/10/6/DJPL/2019	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
30	000006	Kapal Banawa Nusantara 30	Rp	2.329.706.193	HK.201/9/4/DJPL/2019	PL.301/10/7/DJPL/2019	Kabupaten Minahasa Utara
31	000007	Kapal Banawa Nusantara 31	Rp	2.327.654.144	HK.201/9/5/DJPL/2019	PL.301/10/8/DJPL/2019	Kabupaten Banggai Laut
32	000008	Kapal Banawa Nusantara 32	Rp	2.327.654.143	HK.201/9/6/DJPL/2019	PL.301/10/9/DJPL/2019	Kota Tidore Kepulauan
33	000009	Kapal Banawa Nusantara 33	Rp	2.277.345.094	HK.201/9/7/DJPL/2019	PL.301/10/10/DJPL/2019	Kabupaten Kepulauan Aru
34	000010	Kapal Banawa Nusantara 34	Rp	2.277.345.093	HK.201/9/8/DJPL/2019	PL.301/10/11/DJPL/2019	Kabupaten Maluku Barat Daya
35	000011	Kapal Banawa Nusantara 35	Rp	2.277.345.094	HK.201/11/19/DJPL/2019	PL.301/143/DJPL/2019	Kabupaten Maluku Tenggara
36	000012	Kapal Banawa Nusantara 36	Rp	2.277.345.093	HK.201/11/20/DJPL/2019	PL.301/14/4/DJPL/2019	Kabupaten Bone
37	000013	Kapal Banawa Nusantara 37	Rp	2.331.787.944	HK.201/11/15/DJPL/2019	PL.301/13/19/DJPL/2019	Kabupaten Halmahera Tengah
38	000014	Kapal Banawa Nusantara 38	Rp	2.331.787.944	HK.201/1/17/DJPL/2020	PL.301/1/18/DJPL/2020	Kabupaten Halmahera Barat
39	000015	Kapal Banawa Nusantara 39	Rp	2.331.787.944	HK.201/10/8/DJPL/2019	PL.301/10/12/DJPL/2019	Kota Ternate
40	000016	Kapal Banawa Nusantara 40	Rp	2.331.787.943	HK.201/1/13/DJPL/2020	PL.301/1/14/DJPL/2020	Kabupaten Banggai Kepulauan
41	000017	Kapal Banawa Nusantara 41	Rp	2.338.660.894	HK.201/9/10/DJPL/2019	PL.301/10/13/DJPL/2019	Kabupaten Manokwari Selatan
42	000018	Kapal Banawa Nusantara 42	Rp	2.338.660.893	HK.201/9/11/DJPL/2019	PL.301/10/14/DJPL/2019	Kabupaten Teluk Wondama
43	000019	Kapal Banawa Nusantara 43	Rp	2.331.787.944	HK.201/1/14/DJPL/2020	PL.301/1/15/DJPL/2020	Kabupaten Banggai
44	000020	Kapal Banawa Nusantara 44	Rp	2.331.787.943	HK.201/1/15/DJPL/2020	PL.301/1/16/DJPL/2020	Kabupaten Buru
45	000021	Kapal Banawa Nusantara 45	Rp	2.327.654.144	HK.201/9/12/DJPL/2019	PL.301/10/15/DJPL/2019	Kabupaten Konawe Utara
46	000022	Kapal Banawa Nusantara 46	Rp	2.327.654.143	HK.201/9/13/DJPL/2019	PL.301/10/16/DJPL/2019	Kabupaten Muna

47	000023	Kapal Banawa Nusantara 47	Rp	2.286.427.794	HK.201/11/14/DJPL/2019	PL.301/13/18/DJPL/2019	Kabupaten Pulau Morotai
48	000024	Kapal Banawa Nusantara 48	Rp	2.286.427.793	HK.201/11/18/DJPL/2019	PL.301/14/2/DJPL/2019	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
49	000025	Kapal Banawa Nusantara 49	Rp	2.341.288.245	HK.201/4/6/DJPL/2019 HK.201/1/16/DJPL/2020 (ADD 1)	PL.301/4/20/DJPL/2019 PL.301/1/17/DJPL/2020 (ADD 1)	Kabupaten Bantaeng
50	000026	Kapal Banawa Nusantara 50	Rp	2.341.288.245	HK.201/5/14/DJPL/2019	PL.301/6/8/DJPL/2019	Kota Sabang
51	000027	Kapal Banawa Nusantara 51	Rp	2.356.430.745	HK.201/5/15/DJPL/2019 HK.201/7/10/DJPL/2019	PL.301/8/5/DJPL/2019	Kabupaten Mesuji
52	000028	Kapal Banawa Nusantara 52	Rp	2.356.430.745	HK.201/5/16/DJPL/2019 HK.201/7/14/DJPL/2019	PL.301/8/11/DJPL/2019	Kabupaten Natuna
53	000029	Kapal Banawa Nusantara 53	Rp	2.348.582.745	HK.201/3/18/DJPL/2019	PL.301/4/12/DJPL/2019	Kabupaten Buton Selatan
54	000030	Kapal Banawa Nusantara 54	Rp	2.331.608.644	HK.201/11/16/DJPL/2019	PL.301/13/20/DJPL/2019	Kabupaten Konawe Kepulauan
55	000031	Kapal Banawa Nusantara 55	Rp	2.348.582.745	HK.201/4/13/DJPL/2019	PL.301/5/7/DJPL/2019	Kabupaten Buton Tengah
56	000032	Kapal Banawa Nusantara 56	Rp	2.331.608.643	HK.201/11/17/DJPL/2019	PL.301/14/1/DJPL/2019	Kabupaten Buton Utara
57	000033	Kapal Banawa Nusantara 57	Rp	2.356.536.245	HK.201/3/19/DJPL/2019 HK.201/7/11/DJPL/2019 (ADD 1)	PL.301/4/13/DJPL/2019 PL.301/7/16/DJPL/2019 (ADD 1)	Provinsi Lampung
58	000034	Kapal Banawa Nusantara 58	Rp	2.356.536.245	HK.201/3/20/DJPL/2019 HK.201/7/11/DJPL/2019 (ADD 1)	PL.301/4/14/DJPL/2019 PL.301/8/6/DJPL/2019 (ADD 1)	Kabupaten Kampar
59	000035	Kapal Banawa Nusantara 59	Rp	2.355.741.144	HK.201/9/14/DJPL/2019	PL.301/10/17/DJPL/2019	Kabupaten Rote Ndao
60	000036	Kapal Banawa Nusantara 60	Rp	2.355.741.143	HK.201/9/15/DJPL/2019	PL.301/10/18/DJPL/2019	Kabupaten Flores Timur
61	000037	Kapal Banawa Nusantara 61	Rp	2.356.285.745	HK.201/4/15/DJPL/2019	PL.301/5/9/DJPL/2019	Provinsi Bengkulu
62	000038	Kapal Banawa Nusantara 62	Rp	2.356.285.745	HK.201/4/16/DJPL/2019 HK.201/7/3/DJPL/2019	PL.301/7/18/DJPL/2019	Kabupaten Tanggamus
63	000039	Kapal Banawa Nusantara 63	Rp	2.357.192.245	HK.201/3/16/DJPL/2019	PL.301/4/10/DJPL/2019	Kota Denpasar
64	000040	Kapal Banawa Nusantara 64	Rp	2.357.192.245	HK.201/4/DJPL/2019	PL.301/5/2/DJPL/2019	Kota Tanjung Pinang
65	000041	Kapal Banawa Nusantara 65	Rp	2.356.430.745	HK.201/4/14/DJPL/2019	PL.301/5/8/DJPL/2019	Provinsi Sulawesi Barat
66	000042	Kapal Banawa Nusantara 66	Rp	2.342.817.468	HK.201/9/16/DJPL/2019	PL.301/10/19/DJPL/2019	Kabupaten Buru Selatan
67	000043	Kapal Banawa Nusantara 67	Rp	2.357.192.245	HK.201/4/9/DJPL/2019	PL.301/5/3/DJPL/2019	Kabupaten Bintan
68	000044	Kapal Banawa Nusantara 68	Rp	2.357.192.245	HK.201/4/10/DJPL/2019 HK.201/7/12/DJPL/2019	PL.301/8/7/DJPL/2019	Kabupaten Pesisir Barat
69	000045	Kapal Banawa Nusantara 69	Rp	2.356.203.545	HK.201/3/11/DJPL/2019 HK.201/7/13/DJPL/2019	PL.301/8/8/DJPL/2019	Kabupaten Kayong Utara
70	000046	Kapal Banawa Nusantara 70	Rp	2.356.203.545	HK.201/3/12/DJPL/2019	PL.301/4/6/DJPL/2019	Kabupaten Cilacap
71	000047	Kapal Banawa Nusantara 71	Rp	2.323.201.894	HK.201/9/17/DJPL/2019	PL.301/10/20/DJPL/2019	Kabupaten Mamberamo Raya
72	000048	Kapal Banawa Nusantara 72	Rp	2.323.201.893	HK.201/9/18/DJPL/2019	PL.301/11/1/DJPL/2019	Kabupaten Boven Digoel
73	000049	Kapal Banawa Nusantara 73	Rp	2.356.285.745	HK.201/6/16/DJPL/2019 HK.201/6/16/DJPL/2019 (ADD 1)	PL.301/5/11/DJPL/2019 PL.301/7/11/DJPL/2019 (ADD 1)	Kabupaten Lampung Selatan
74	000050	Kapal Banawa Nusantara 74	Rp	2.356.285.745	HK.201/4/18/DJPL/2019	PL.301/5/12/DJPL/2019	Provinsi Dki Jakarta
75	000051	Kapal Banawa Nusantara 75	Rp	2.355.741.144	HK.201/11/10/DJPL	PL.301/13/12/DJPL/2019	Kota Serang
76	000052	Kapal Banawa Nusantara 76	Rp	2.355.741.143	HK.201/11/10/DJPL/2019	PL.301/13/13/DJPL/2019	Kabupaten Kotawaringin Timur
77	000053	Kapal Banawa Nusantara 77	Rp	2.355.706.144	HK.201/10/1/DJPL/2019	PL.301/11/4/DJPL/2019	Kabupaten Bima
78	000054	Kapal Banawa Nusantara 78	Rp	2.355.706.143	HK.201/10/2/DJPL/2019	PL.301/11/5/DJPL/2019	Kabupaten Tojo Una-Una
79	000055	Kapal Banawa Nusantara 79	Rp	2.341.288.245	HK.201/5/3/DJPL/2019	PL.301/5/17/DJPL/2019	Kabupaten Nunukan
80	000056	Kapal Banawa Nusantara 80	Rp	2.356.430.745	HK.201/5/4/DJPL/2019	PL.301/5/18/DJPL/2019	Kabupaten Barru
81	000057	Kapal Banawa Nusantara 81	Rp	2.342.817.469	HK.201/10/3/DJPL/2019	PL.301/11/6/DJPL/2019	Kabupaten Luwu Timur
82	000058	Kapal Banawa Nusantara 82	Rp	2.342.817.468	HK.201/10/4/DJPL/2019	PL.301/11/7/DJPL/2019	Kabupaten Luwu Utara
83	000059	Kapal Banawa Nusantara 83	Rp	2.356.203.545	HK.201/5/7/DJPL/2019	PL.301/6/1/DJPL/2019	Kabupaten Takalar
84	000060	Kapal Banawa Nusantara 84	Rp	2.356.203.545	HK.201/5/8/DJPL/2019	PL.301/6/2/DJPL/2019	Provinsi Nusa Tenggara Barat

85	000061	Kapal Banawa Nusantara 85	Rp	2.319.140.244	HK.201/10/5/DJPL/2019	PL.301/11/8/DJPL/2019	Kabupaten Pohuwato
86	000062	Kapal Banawa Nusantara 86	Rp	2.319.140.243	HK.201/10/6/DJPL/2019	PL.301/11/9/DJPL/2019	Kabupaten Gorontalo Utara
87	000063	Kapal Banawa Nusantara 87	Rp	2.356.536.245	HK.201/4/1/DJPL/2019 HK.201/6/17/DJPL/2019	PL.301/7/12/DJPL/2019	Kabupaten Rokan Hilir
88	000064	Kapal Banawa Nusantara 88	Rp	2.356.536.245	201/4/2/DJPL/2019 HK. 201/7/4/DJPL/2019	PL.301/7/19/DJPL/2019	Kota Pariaman
89	000065	Kapal Banawa Nusantara 89	Rp	2.356.203.545	HK. 201/5/12/DJPL/2019	PL. 301/6/6/DJPL/2019	Kabupaten Pinrang
90	000066	Kapal Banawa Nusantara 90	Rp	2.346.974.043	HK.201/10/7/DJPL/2019	PL.301/11/10/DJPL/2019	Kabupaten Kepulauan Selayar
91	000067	Kapal Banawa Nusantara 91	Rp	2.341.288.245	HK. 201/5/9/DJPL/2019 HK. 201/7/5/DJPL/2019	PL. 301/7/20/DJPL/2019	Kabupaten Tana Tidung
92	000068	Kapal Banawa Nusantara 92	Rp	2.341.288.245	HK. 201/6/20/DJPL/2019 HK. 201/6/20/DJPL/2019	PL. 301/7/15/DJPL/2019	Provinsi Kalimantan Utara
93	000069	Kapal Banawa Nusantara 93	Rp	2.323.201.894	HK.201/10/10/DJPL/2019	PL.301/11/13/DJPL/2019	Kabupaten Nduga
94	000070	Kapal Banawa Nusantara 94	Rp	2.323.201.893	HK.201/10/10/DJPL/2019	PL.301/11/13/DJPL/2019	Kabupaten Nduga
95	000071	Kapal Banawa Nusantara 95	Rp	2.341.288.245	HK.201/4/3/DJPL/2019	PL.301/4/17/DJPL/2019	Provinsi Riau
96	000072	Kapal Banawa Nusantara 96	Rp	2.356.536.245	HK.201/4/15/DJPL/2019 HK. 201/7/6/DJPL/2019	PL. 301/8/1/DJPL/2019	Kota Bengkulu
97	000073	Kapal Banawa Nusantara 97	Rp	2.356.285.745	HK.201/4/19/DJPL/2019 HK. 201/6/18/DJPL/2019	PL.301/7/13/DJPL/2019	Kabupaten Lampung Tengah
98	000074	Kapal Banawa Nusantara 98	Rp	2.356.285.745	HK.201/4/4/DJPL/2019 HK.201/7/2/DJPL/2019	PL.301/7/17/DJPL/2019	Kabupaten Jepara
99	000075	Kapal Banawa Nusantara 99	Rp	2.356.536.245	HK.201/4/7/DJPL/2019	PL.301/5/1/DJPL/2019	Kabupaten Situbondo
100	000076	Kapal Banawa Nusantara 100	Rp	2.353.908.893	HK.201/9/4/DJPL/2019	PL.301/10/7/DJPL/2019	Kabupaten Minahasa Utara
101	000077	Kapal Banawa Nusantara 101	Rp	2.341.288.245	HK.201/5/11/DJPL/2019 HK. 201/6/19/DJPL/2019	PL. 301/7/14/DJPL/2019	Kabupaten Mamuju
102	000078	Kapal Banawa Nusantara 102	Rp	2.338.660.893	HK.201/10/15/DJPL/2019	PL.301/11/18/DJPL/2019	Kabupaten Seram Bagian Barat
103	000079	Kapal Banawa Nusantara 103	Rp	2.357.227.245	HK.201/4/11/DJPL/2019 HK.201/7/7/DJPL/2019 (ADD 1)	PL.301/5/5/DJPL/2019 PL.301/8/2/DJPL/2019 (ADD 1)	Kabupaten Belitung
104	000080	Kapal Banawa Nusantara 104	Rp	2.357.227.245	HK.201/4/12/DJPL/2019	PL.301/5/6/DJPL/2019	Provinsi Bangka Belitung
105	000081	Kapal Banawa Nusantara 105	Rp	2.342.817.469	HK.201/10/16/DJPL/2019	PL.301/11/19/DJPL/2019	Kabupaten Sinjai
106	000082	Kapal Banawa Nusantara 106	Rp	2.342.817.468	HK.201/4/20/DJPL/2019	PL.301/11/20/DJPL/2019	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
107	000083	Kapal Banawa Nusantara 107	Rp	2.357.227.245	HK.201/3/13/DJPL/2019	PL.301/4/7/DJPL/2019	Kabupaten Siak
108	000084	Kapal Banawa Nusantara 108	Rp	2.357.227.245	HK. 201/3/14/DJPL/2019	PL.301/4/8/DJPL/2019	Kabupaten Bangka Selatan
109	000085	Kapal Banawa Nusantara 109	Rp	2.354.599.894	HK.201/10/18/DJPL/2019	PL.301/12/1/DJPL/2019	Kabupaten Lembata
110	000086	Kapal Banawa Nusantara 110	Rp	2.354.599.893	HK.201/10/19/DJPL/2019	PL.301/12/2/DJPL/2019	Kabupaten Alor
111	000087	Kapal Banawa Nusantara 111	Rp	2.356.285.745	HK.201/5/1/DJPL/2019	PL.301/5/15/DJPL/2019	Kabupaten Nias Selatan
112	000088	Kapal Banawa Nusantara 112	Rp	2.356.285.745	HK.201/5/2/DJPL/2019	PL.301/5/16/DJPL/2019	Kota Dumai
113	000089	Kapal Banawa Nusantara 113	Rp	2.356.536.245	HK.201/3/15/DJPL/2019 HK. 201/7/8/DJPL/2019	PL. 301/8/3/DJPL/2019	Kabupaten Pesawaran
114	000090	Kapal Banawa Nusantara 114	Rp	2.353.576.193	HK.201/10/8/DJPL/2019	PL.301/10/12/DJPL/2019	Kota Ternate
115	000091	Kapal Banawa Nusantara 115	Rp	2.325.421.144	HK.201/10/12/DJPL/2019	PL.301/11/15/DJPL/2019	Kabupaten Mappi
116	000092	Kapal Banawa Nusantara 116	Rp	2.325.421.143	HK.201/10/13/DJPL/2019	PL.301/11/16/DJPL/2019	Kabupaten Biak Numfor
117	000093	Kapal Banawa Nusantara 117	Rp	2.356.203.545	HK. 201/3/17/DJPL/2019 HK. 201/7/9/DJPL/2019	PL. 301/8/4/DJPL/2019	Kota Bima
118	000094	Kapal Banawa Nusantara 118	Rp	2.368.491.494	HK.201/10/9/DJPL/2019	PL.301/11/12/DJPL/2019	Kabupaten Kaimana
C. Kapal Pelayaran Rakyat Tahun 2018 - 2019 (MYC)							
119	000095	Kapal Banawa Nusantara 119	Rp	2.335.570.000	HK.201/1/15/DJPL/2020	PL.301/1/16/DJPL/2020	Kabupaten Buru
120	000096	Kapal Banawa Nusantara 120	Rp	2.335.570.000	HK.201/3/13/DJPL/2021	PL.301/4/15/DJPL/2020	Kota Tanjung Pinang
121	000140	Kapal Banawa Nusantara 121	Rp	2.185.215.000	PL.301/8/10/DJPL/2020	PL.301/8/11/DJPL/2020	Kabupaten Sumenep
122	000141	Kapal Banawa Nusantara 122	Rp	2.185.215.000	PL.301/8/10/DJPL/2020	PL.301/8/11/DJPL/2020	Kabupaten Sumenep

123	000099	Kapal Banawa Nusantara 123	Rp	2.353.360.000	HK.201/3/17/DJPL/2025	PL.301/4/19/DJPL/2020	Kabupaten Bangka Selatan
124	000100	Kapal Banawa Nusantara 124	Rp	2.353.220.000	HK.201/4/1/DJPL/2029	PL.301/5/3/DJPL/2020	Provinsi Lampung
125	000101	Kapal Banawa Nusantara 125	Rp	2.353.360.000	HK.201/3/18/DJPL/2026	PL.301/4/20/DJPL/2020	Kabupaten Tanggamus
126	000102	Kapal Banawa Nusantara 126	Rp	2.353.220.000	HK.201/3/19/DJPL/2027	PL.301/5/1/DJPL/2020	Kabupaten Lampung Tengah
127	000103	Kapal Banawa Nusantara 127	Rp	2.330.065.000	HK.201/1/16/DJPL/2020 (ADD 1)	PL.301/1/17/DJPL/2020 (ADD 1)	Kabupaten Bantaeng
128	000105	Kapal Banawa Nusantara 128	Rp	2.330.065.000	HK.201/1/17/DJPL/2020	PL.301/1/18/DJPL/2020	Kabupaten Halmahera Barat
129	000106	Kapal Banawa Nusantara 129	Rp	2.353.360.000	HK.201/4/2/DJPL/2020	PL.301/5/4/DJPL/2020	Kabupaten Pesawaran
130	000107	Kapal Banawa Nusantara 130	Rp	2.353.220.000	HK.201/3/20/DJPL/2020	PL.301/5/2/DJPL/2020	Kota Bengkulu
131	000108	Kapal Banawa Nusantara 131	Rp	2.335.570.000	HK.201/4/3/DJPL/2020	PL.301/5/5/DJPL/2020	Kabupaten Lampung Timur
132	000109	Kapal Banawa Nusantara 132	Rp	2.335.570.000	HK.201/3/14/DJPL/2020	PL.301/4/16/DJPL/2020	Kabupaten Ende
133	000110	Kapal Banawa Nusantara 133	Rp	2.329.870.000	HK.201/3/15/DJPL/2020	PL.301/4/17/DJPL/2020	Kabupaten Kayong Utara
134	000111	Kapal Banawa Nusantara 134	Rp	2.329.870.000	HK.201/3/12/DJPL/2020	PL.301/4/14/DJPL/2020	Provinsi Bengkulu
135	000112	Kapal Banawa Nusantara 135	Rp	2.330.065.000	HK.201/1/13/DJPL/2020	PL.301/1/14/DJPL/2020	Kabupaten Banggai Kepulauan
136	000113	Kapal Banawa Nusantara 136	Rp	2.330.065.000	HK.201/1/14/DJPL/2020	PL.301/1/15/DJPL/2020	Kabupaten Banggai
137	000114	Kapal Banawa Nusantara 137	Rp	2.329.870.000	HK.201/3/16/DJPL/2020	PL.301/4/18/DJPL/2020	Kabupaten Flores Timur
138	000115	Kapal Banawa Nusantara 138	Rp	2.329.870.000	HK.201/3/9/DJPL/2020	PL.301/4/12/DJPL/2020	Kabupaten Alor
Jumlah			Rp	266.569.670.879			

F. DAFTAR KAPAL DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Terdapat jumlah kapal sebanyak 157 unit pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapal Tercatat Definitif : 103 Unit
2. Kapal Tercatat di KDP : 44 Unit
3. Kapal Tercatat di KSOP : 9 Unit
4. Belum Tercatat di SIMAK BMN : 1 Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TERCATAT DEFINITIF PADA SATKER LALA	: 95 UNIT	89 Unit telah terbit SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) 6 Unit dalam Proses PSP di Kemenkeu
2	TERCATAT KDP	: 44 UNIT	9 Unit belum selesai Fisik 35 Unit belum selesai pembayaran
3	TERCATAT DIREKTORAT LALA	: 8 UNIT	Pengelola SIMAK di Seditjen/Bagian Umum dan Perlengkapan dalam proses pembuatan SK Tim Internal – Sudah di Transfer ke LK Satker Lala (439454)
4	TERCATAT DI KSOP	: 9 UNIT	2 Unit di KSOP Ambon 1 Unit di KSOP Jayapura 1 Unit di UPP Kwandang 1 Unit di KSOP Merauke 1 Unit di KSOP Sorong sudah terbit SK PSP 1 Unit di KSOP Tanjung Pinang 1 Unit di KSOP Tanjung Wangi 1 Unit di UPP Saumlaki
5	BLM TERCATAT SIMAK	: 1 UNIT	Tranfer Keluar dari Satker LALA ke KSOP Meulaboh, tetapi di SIMAK Meulaboh Belum tercatat
	JUMLAH KAPAL	: 157 UNIT	

G. SUMBER DANA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

1. KEBIJAKAN PEMANFAATAN PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
 - a. Pemanfaatan SBSN untuk pembiayaan proyek sesuai dengan kerangka makro RPJMN 2015-2019, antara lain :
 - Untuk menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%; dan
 - Mempertahankan keberlanjutan fiskal.
 - b. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:
 - Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri);
 - Dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan); dan
 - Mengurangi kesenjangan antar wilayah (barat dan timur).
 - c. Fokus pemanfaatan SBSN adalah untuk membiayai proyek Infrastruktur dan proyek Pelayanan Umum.
 - d. Pelaksanaan proyek SBSN, diutamakan instansi yang sudah pernah melaksanakan proyek SBSN.
 - Kementerian Perhubungan, misalnya proyek pembangunan jalur kereta api dan fasilitas perkeretaapian (seperti sinyal dan elektrifikasi)
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, fly over dan underpas, dan pembangunan jalan bebas hambatan.
 - Kementerian Agama, misalnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Islam, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan balain nikah/KUA.
2. KORIDOR PEMBIAYAAN PROYEK SBSN
 - a. Memastikan alokasi untuk proyek SBSN yang telah ditetapkan *multiyears*-nya.
 - b. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang tinggi dan dapat dijalankan pada awal tahun anggaran, meliputi antara lain:
 - Ketersediaan lahan/tanah tidak bermasalah (termasuk penghapusan gedung/bangunan yang ada pada lokasi proyek)
 - Ketersediaan dokumen perencanaan proyek, misalnya *detail engineering design/DED*
 - c. Dapat dikerjakan dengan teknologi dalam negeri.
 - d. Kementerian/Lembaga memiliki kemampuan untuk melaksanakan (terutama untuk proyek yang memiliki ketersebaran luas dan nilai yang besar).
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan Pagu DIPA dengan Sumber Dana SBSN sebesar Rp. 208.576.009.000 dengan realisasi sebesar Rp. 72.697.879.935 atau 27,5 % yang tersebar pada UPP Nabire, UPP Kaimana, Disnav Tarakan dan UPP Seba.

H. Belanja Barang Dibayar Dimuka (Prepaid) & Utang Kepada Pihak Ketiga

1. Terdapat Belanja Barang Dibayar Dimuka berupa pembayaran atas Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebesar Rp32.084.250,-. Satker tidak memiliki aset Rumah Dinas sehingga dibutuhkan penyewaan kepada pihak ketiga pada tanggal 17 November 2020 untuk penyewaan rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Kantor.

2. Terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada beberapa jenis utang dan satker, diantaranya:
- Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Terdapat Belanja Pegawai YMHD sebesar Rp2.891.173.743,- pada 21 Satker atas Utang terkait perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai TA. 2020
 - Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Terdapat Belanja Barang YMHD sebesar Rp167.303.355,- pada 18 Satker atas Utang terkait perhitungan Beban Listrik, Air, dan Telepon TA. 2020
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp27.763.346,- pada KSOP Muara Angke. Sudah dilakukan penyeteroran pada TA. 2021 atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

I. Aset Tetap Renovasi

Terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp18.727.099.914,- pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di beberapa satker, diantaranya:

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Keterangan
1	287537	KSOP AMBON	5.067.429.700	Docking Kapal Perintis KM. Wetar, KM. Maloli dan KM. Bandanaire milik Satker Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Serta Pemeliharaan Gedung Kantor milik Distrik Navigasi Ambon.
2	412772	KANPUS HUBLA	908.425.521	Lift Gedung dan Bangunan Kantor di Jalan Medan Merdeka Timur. Transfer Masuk Tahun 2014. Sudah ada BAST.
3	412797	KSOP SUNDA KELAPA	172.898.923	Transfer Masuk dari KSOP Muara Baru berupa peninggian lantai bawah kantor Muara Baru di atas Tanah dan Bangunan Milik Perum Perindo (Hasil pekerjaan direncanakan akan diserahkan ke KKP)
4	412891	OP TANJUNG PERAK	1.497.750.000	Docking Kapal Kapal Amukti Palapa (Kapal milik Satuan Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
5	413417	KSU BELAWAN	223.693.996	Aset induk (Kantor/Terminal Penumpang) yang drenovasi sudah di robokkan, serta SK Penghapusan ATR dari KPKNL sudah terbit (menunggu eksekusi penghapusan di SIMAK)
6	413670	KSOP BANTEN	2.404.044.000	Rehabilitasi Gedung Kantor di KSOP Banten milik PT. Pelindo II cabang Banten. Belum dilakukan serah terima karena PT. Pelindo belum membentuk Tim.
7	522582	KSOP KUPANG	1.937.761.100	Pekerjaan Docking Kapal Perintis milik Satker Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut KN. Nemberala dan Nangalala
8	559154	UPP BATANG	431.004.000	Lapangan penumpukan yang dibangun diatas Tanah milik Dinas Perikanan, rencana akan diserahkan ke Dinas perikanan setempat.
9	559470	UPP BULI	5.027.100.000	Renovasi Pelabuhan Rakyat (Pelra) di atas Tanah milik Pemerintah Daerah
10	652542	KSOP BANDANAIRE	569.500.000	Fender yang ditempatkan di Dermaga milik Pelindo
11	652584	PLP DANAR / TUAL	487.492.674	Pembangunan Paving Block Mess/Asrama di atas Tanah milik Distrik Navigasi Tual
TOTAL			18.727.099.914	

J. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp13.525.736.144.844,- pada 87 satker di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Rincian KDP Ditjen Hubla sebagai berikut:

1. KDP Dilanjutkan sebesar Rp13.250.593.936.854,-
2. KDP Dihentikan Sementara sebesar Rp243.448.085.145,-
3. KDP Dihentikan Permanen sebesar Rp31.694.122.845,- yang terdapat pada 5 Satker Ditjen Perhubungan Laut. Rincian KDP Dihentikan Permanen yaitu:

Nomor	Nama Satker	Nilai	Penjelasan
1	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK PALU	18.565.069.990	<i>DIKARENAKAN DAMPAK BENCANA ALAM/ TSUNAMI</i>
2	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	49.104.000	<i>Merupakan pembuatan Dokumen perencanaan pembangunan kapal inspeksi yang tidak dilanjutkan karena tidak sesuai tusi</i>
3	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANIPAHAN	7.490.625.000	<i>Terdapat pekerjaan fasilitas pelabuhan terindikasi mangkrak</i>
4	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KAIRATU	2.340.075.000	<i>Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Faspel Laut Piru di Pelabuhan Ariate TA. 2011, Karena terdapat permasalahan Tanah dengan pihak lain</i>
5	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AMAHAI	3.249.248.855	<i>Hambatan dalam pekerjaan pada fasilitas Pelabuhan dikarenakan terdapat permasalahan terkait tanah</i>
TOTAL		31.694.122.845	

K. Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 sebanyak 33.992 NUP BMN telah selesai dilakukan penilaian kembali dengan nilai wajar baru sebesar Rp. 61.577.794.023.484. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp 14.872.257.754.590 atau 24,15 % dari nilai wajar lama sebesar Rp 46.705.536.268.894 dan nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp 18.342.528.391.546. Berikut rincian Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018:

Inventarisasi					Penilaian			
Ditemukan	Tidak Ditemukan	Berlebih	Tanpa Keterangan	Total	Nilai Buku	Nilai Wajar Lama	Perubahan	Nilai Wajar Baru
33.992	4.986	1.021	126	40.125	18.342.528.391.546	46.705.536.268.894	14.872.257.754.590	61.577.794.023.484

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:

Pada Tahun 2018 BPK telah melakukan pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018, mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembali masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Adapun koreksi

atas pelaksanaan kembali BMN disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Unaudited*) adalah sebesar Rp 8.309.228.017.117,- Rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per akun sebagai berikut:

No.	Akun	Uraian	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Jumlah Total
1	131111	Tanah	3.852.856.243.721	2.215.168.762.474	266.647.179.416	21.693.294.578	6.356.365.480.189
2	133111	Gedung dan Bangunan	194.297.479.800	73.747.079.350	243.921.725.912	315.400.561.627	827.366.846.689
4	134111	Jalan dan Jembatan	(732.433.431.219)	(1.474.828.296.589)	339.005.593.295	722.517.570.267	(1.145.738.564.246)
3	134112	Irigasi	(324.381.947.641)	(529.915.966.683)	(255.624.222.881)	90.261.445.795	(1.019.660.691.410)
5	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	379.912.423.976	347.831.325.321	(467.708.644)	33.954.444.719	761.230.485.372
6	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	277.153.878.052	955.896.846.061	19.108.958.186	30.529.604.493	1.282.689.286.792
7	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	258.199.181.648	999.207.840.914	12.912.924.172	(23.475.943.003)	1.246.844.003.731
8	313221	Transfer Masuk	-	-	131.170.000	-	131.170.000
		TOTAL	3.905.603.828.337	2.587.107.590.848	625.635.619.456	1.190.880.978.476	8.309.228.017.117

L. Hibah Langsung Yang Belum Disahkan

Terdapat Hibah Langsung yang belum disahkan pada Satker Kenavigasian Pusat sebesar Rp646.693.551,-. Nilai tersebut didapat dari rekening per 31 Desember 2020 sebesar USD45.848,50 dengan Kurs Tengah BI sebesar Rp14.105,01. Kas tersebut belum dilakukan pengesahan karena tidak ada Kegiatan (DIPA Satker) Selama Tahun 2020. Satker akan melakukan Revisi DIPA dan pengajuan pengesahan hibah langsung jika di TA. 2021 terdapat kegiatan menggunakan dana hibah.

M. SUMBER DANA PHLN

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mengelola Sumber dana Pinjaman Luar Negeri untuk KSOP Patimban untuk kegiatan Pembangunan Faspel Patimban yang bersumber dana dari JICA (Japan International Corporation Agency) dengan Pagu sebesar Rp.2.915.967.171.000,- dan realisasi Rp. 328.937.814.095 atau 11,28%.

N. KEBIJAKAN COVID 19

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Perhubungan Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
4. Laporan Realisasi Penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2020 sebesar 89,61% dengan Pagu Anggaran Rp51.908.339.000,- dan Realisasi sebesar Rp46.517.113.263,-

5. Laporan Padat Karya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2020 dengan Target Jumlah Naker yang Diserap sebanyak 3.628 orang dan Total Upah sebesar Rp6.577.622.476,-. Realisasi pada Ditjen Hubla dengan Jumlah Naker sebanyak 3.381 dan Total Upah sebesar Rp6.260.220.476,- atau sebesar 95,17%
6. Laporan Pagu dan Realisasi PEN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2020 mencapai 97,36% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp73.971.691.608,- dan Realisasi sebesar Rp72.020.745.950,-.

O. Nilai Buku Minus

1. Terdapat nilai buku minus Intrakomptable sebesar Rp163.885.118,- pada 36 NUP di beberapa satker, diantaranya:
 - a. KSOP Sampit
Terdapat 1 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp19.405.760,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.
 - b. Disnav Kupang
Terdapat 2 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp136.514.384,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.
 - c. UPP Bajoe
Terdapat 1 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp3.000.000,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.
 - d. UPP Tanjung Uban
Terdapat 32 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp4.964.974,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.
2. Terdapat Nilai Buku Minus Ekstrakomptable sebesar Rp101.788,- pada 7 NUP di beberapa satker, diantaranya:
 - a. KSU Tanjung Priok
Terdapat 4 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp94.288,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.
 - b. UPP Tanjung Uban
Terdapat 3 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp7.500,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.

P. Reklasifikasi Aset (Reklas Keluar-Reklas Masuk)

Terdapat selisih Reklasifikasi Aset pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp3.222.351.050,- di beberapa satker, diantaranya:

1. KSOP Jayapura
Terdapat transaksi Reklasifikasi Aset dari Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp199.480.600,- berupa Baling-Baling Kapal dan akan digunakan TA.2021.
2. PPLP Tanjung Uban
Terdapat transaksi Reklasifikasi Aset dari Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp16.752.450,- berupa AntiVirus yang ditransfer ke masing-masing satker pada TA. 2020.
3. Satker Perkapalan dan Kepelautan Pusat
Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar Aset Hasil Revaluasi dari penarikan data SIMAN ke SIMAK sebesar Rp27.944.006.800,- dan Reklasifikasi Masuk Hasil Revaluasi sebesar Rp24.937.888.800,- sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp3.006.118.000,-.

Q. Transfer Aset (Transfer Keluar-Transfer Aset)

Terdapat selisih Transfer Keluar-Transfer Masuk Aset pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp487.062.512.199,- yang diakibatkan oleh nilai Transfer Masuk dari luar Eselon I Ditjen Hubla. Hal tersebut tidak menjadi selisih pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Terdapat 2 satker yang menerima transfer masuk dari Eselon I lain, diantaranya:

1. KSOP Patimban

Terdapat transaksi Transfer Masuk aset dari luar Ditjen Hubla (022.04), yaitu LMAN melalui Satker Konsolidasi Kementerian Perhubungan berupa Tanah sebesar Rp486.446.219.342,-.

2. Distrik Navigasi Palembang

Terdapat transaksi Transfer Masuk aset dari luar Ditjen Hubla (022.04), yaitu BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp663.700.000,- beserta penyusutannya sebesar (Rp47.407.143,-).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO